

# **DINAMIKA IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DI KABUPATEN SLEMAN: Antara Kendala dan Solusinya**

Akhmad Ritaudin  
Supadiyanto  
John Suprihanto  
Avin Fadilla Helmi  
Theresia Anita Christiani  
Sudiyo  
Suyono  
St. Nurbaya  
Nurjamil Dimyati  
Buchori  
Nursya'bani Purnama  
Tim Asisten Penulis:  
Bayu Kusuma Wardani  
Citra Bening Sejati  
Hikari Salsabiela Amalia  
Raissa Rahma Nadhira

**Editor**

Supadiyanto



# **DINAMIKA IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DI KABUPATEN SLEMAN: Antara Kendala dan Solusinya**

## **Penulis**

Akhmad Ritaudin, Supadiyanto, John Suprihanto, Avin Fadilla Helmi, Theresia Anita Christiani, Sudiyo, Suyono, St. Nurbaya, Nurjamil Dimyati, Buchori, Nursya'bani Purnama, Bayu Kusuma Wardani, Citra Bening Sejati, Hikari Salsabiela Amalia, Raissa Rahma Nadhira

## **Editor**

Supadiyanto

## **Tata Letak**

Ulfa

## **Desain Sampul**

Zulkarizki

15,5 x 23 cm, vi + 76 hlm.

Cetakan I, Januari 2023

**ISBN:** 978-623-466-194-1

Diterbitkan oleh:

## **ZAHIR PUBLISHING**

Kadisoka RT. 05 RW. 02, Purwomartani,

Kalasan, Sleman, Yogyakarta 55571

e-mail: [zahirpublishing@gmail.com](mailto:zahirpublishing@gmail.com)

Anggota IKAPI D.I. Yogyakarta

No. 132/DIY/2020

bekerja sama dengan:

**Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman**

## **Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.**

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

*Salam hormat,*

Buku yang terbit di hadapan pembaca ini berisi potret implementasi Kurikulum Merdeka mulai dari PAUD, TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Sleman. Kurikulum Merdeka yang menjadi kebijakan baru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sejak tahun 2020 sampai sekarang. Kabupaten Sleman menjadi salah satu kabupaten yang tergolong masuk pada gelombang akhir penerapan Kurikulum Merdeka di DIY, karena baru menerapkannya pada Juli 2022.

Adalah wajar dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Kabupaten Sleman masih dijumpai sejumlah kendala dan hambatan, baik yang dialami oleh para guru, kepala sekolah, murid, orangtua, bahkan pejabat Dinas Pendidikan. Sebab dalam pelaksanaannya, dibutuhkan adaptasi dan penyesuaian oleh berbagai pihak terutama dari para kepala sekolah dan guru sendiri.

Dengan mencermati berbagai persoalan yang menimpa para pihak dalam persiapan sampai pelaksanaan Kurikulum Merdeka, maka dibutuhkan solusi-solusi tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Perubahan adalah sebuah keniscayaan, termasuk adanya perubahan dari Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka menjadi sebuah tuntutan zaman. Kurikulum sebagai perangkat lunak dalam proses pembelajaran di berbagai lembaga pendidikan, menjadi pintu masuk atau garansi bagi upaya untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan.

Kami berharap besar agar buku ini dapat menjadi bahan diskusi dan pertimbangan bagi para pemegang kebijakan dan lembaga pendidikan di Kabupaten Sleman.

Kami mewakili Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman mengapresiasi atas kerjasama yang telah dilakukan kepada: seluruh anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Kepala Sekolah se-Sleman, guru se-Sleman, serta tim asisten penulis, dan penerbit buku yang sudah berjuang keras dalam menerbitkan buku ini.

Kendati penerbitan dan publikasi buku ini cukup terlambat dari target penerbitannya, karena adanya sejumlah kendala teknis seperti proses menunggu terbitnya ISBN (di mana ada penyesuaian terhadap kebijakan baru) dan penyusunan naskah hasil penelitian menjadi naskah buku akibat adanya kebijakan baru dalam dunia penerbitan buku nasional yang membutuhkan perjuangan sendiri, sampai adanya kerusakan pada laptop milik tim penulis. Semoga dapat bermanfaat bagi publik untuk memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Sleman dan seluruh Indonesia.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, 17 Desember 2022

Hormat kami,

**Ketua Dewan Pendidikan  
Kabupaten Sleman,**



**Sudiyo, S.Ag., M.Pd.**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
KEBIJAKAN BARU KURIKULUM MERDEKA .....	1
Prolog .....	1
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DI BERBAGAI DAERAH .....	4
PELAKSANAAN KURIKULUM MERDEKA DI KABUPATEN SLEMAN .....	6
Fakta-Fakta Tentang IKM di Kabupaten Sleman .....	6
Persiapan Pihak Sekolah Dalam Menyambut IKM .....	8
Alasan Memilih Menerapkan Kurikulum Merdeka .....	12
DAMPAK PELAKSANAAN KURIKULUM MERDEKA .....	14
Kendala dan Masalah .....	16
Kendala Bagi Siswa .....	19
Kendala Bagi Guru .....	20
Informasi dan Sosialisasi Kurikulum Merdeka .....	22
Fasilitas dan Infrastruktur .....	23
TANGGAPAN GURU, SISWA, DAN ORANGTUA/WALI MURID...	24
Tanggapan Siswa .....	25
Tanggapan Orang Tua Siswa .....	26
Persiapan Pihak Sekolah .....	26
Hambatan Pelaksanaan Kurikulum 2013 .....	27
Penyelesaian Masalah dari Kendala yang Dihadapi .....	27
Pelaksanaan Evaluasi .....	27
Sosialisasi dan Pemahaman Terkait Kurikulum Merdeka ....	27
Masalah dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka .....	28
Solusi/Penyelesaian Masalah Dari Kendala yang Dihadapi	29

Kekhasan Kurikulum Merdeka jika Dibandingkan Dengan Kurikulum Lama.....	29
Dampak .....	30
Sikap dan Kebijakan Para Pemangku Kepentingan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.....	30
Kendala dan Hambatan yang Dialami Dalam Pelaksanaan IKM .....	35
Masalah Dalam Pelaksanaan IKM.....	47
Diskusi.....	49
KURIKULUM MERDEKA DAN PR KE DEPAN.....	51
Rekomendasi Tim Penulis untuk IKM.....	52
DAFTAR PUSTAKA .....	55
LAMPIRAN .....	56
PROFIL TIM PENELITI/PENULIS.....	72

# **KEBIJAKAN BARU KURIKULUM MERDEKA**

## **Prolog**

Kurikulum Merdeka menuntut para guru dan kepala sekolah untuk dapat kreatif dalam mengimplementasikan kurikulum dalam Kegiatan Belajar Mengajar baik di dalam kelas maupun luar kelas. Sekolah membuat kurikulum operasional satuan pendidikan secara mandiri. Para guru dan kepala sekolah sangat disarankan untuk belajar secara mandiri melalui *Platform* Merdeka Mengajar. Selain itu, dapat juga belajar dari sekolah atau praktik-praktik baik yang sudah dilakukan guru ataupun komunitas belajar lainnya.

Melalui model pembelajaran mandiri diharapkan terjadi perubahan atau perbedaan yang mendasar yang memungkinkan terwujudnya hasil dari implementasi Kurikulum Merdeka. Selain itu, diharapkan dapat melahirkan strategi dan cara-cara yang efektif dan efisien untuk menggerakkan ekosistem sekolah dalam menerapkan Kurikulum Merdeka secara komprehensif sehingga terwujud lulusan memiliki kompetensi dengan daya saing tinggi.

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini para guru banyak menemukan kesulitan saat melaksanakan implementasi Kurikulum Merdeka. Masih banyak ditemui pemahaman konsep tentang pelaksanaan Kurikulum Merdeka yang berbeda-beda. Para guru masih kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila. Sebagian besar sekolah di Kabupaten Sleman sedang berjuang menghadapi transisi Pendidikan perkembangan kurikulum dari Kurikulum 13 (K-13) menjadi Kurikulum Merdeka.

Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup banyak waktu untuk mendalami konsep-konsep dan menguatkan kompetensi. Guru sendiri memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga

pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Model Kurikulum Merdeka yang luwes dan fleksibel ini justru menimbulkan banyak masalah dalam pelaksanaan di lapangan karena memiliki tafsir dan pemaknaan yang luas dan beragam; sehingga bagi guru yang tidak kreatif, mereka akan mengalami kesulitan dalam pengimpelementasiannya.

Proyek yang dikembangkan dalam Kurikulum Merdeka bertujuan untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila, yang dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Inilah yang membedakan antara Kurikulum 13 dan Kurikulum Merdeka, di mana Capaian Pembelajaran (CPL) menjadi garis pembedanya.

Berbagai kendala dan masalah dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka di setiap sekolah menjadi tanggung jawab kita bersama. Perlu adanya berbagai solusi atas sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh murid, para guru, kepala sekolah, termasuk para pemegang kebijakan seiring dengan pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Buku ini mengajak kepada para guru dan kepala sekolah untuk curah pendapat dan berbagi pengalaman dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka.

Sejatinya, perlu adanya pemetaan masalah besar yang dihadapi para guru dan kepala sekolah dalam mempersiapkan dan melaksanakan Kurikulum Merdeka khususnya di Kabupaten Sleman. Perlu juga memformulasikan solusi-solusi atas beragam problematika yang dihadapi para guru dan kepala sekolah dalam mempersiapkan dan melaksanakan Kurikulum Merdeka di Kabupaten Sleman.

Secara akademis, kehadiran buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dalam melaksanakan kurikulum Merdeka di Kabupaten Sleman. Secara praktis, buku ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para kepala



sekolah dan guru dalam mengawal pelaksanaan Kurikulum Merdeka agar dapat berjalan lancar dan sukses di Kabupaten Sleman. Secara sosial, kehadiran buku ini diharapkan mampu memberikan kontribusi besar pada kemajuan dunia pendidikan, sehingga masyarakat semakin sadar dan peduli terhadap kesuksesan IKM.

## **IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DI BERBAGAI DAERAH**

Sampai saat ini, belum banyak ditemukan hasil kajian komprehensif yang mengupas mengenai implementasi Kurikulum Merdeka. Hal ini mengingat Kurikulum Merdeka masih menjadi wacana baru di sejumlah daerah. Termasuk di Kabupaten Sleman, Kurikulum Merdeka baru mulai diadopsi untuk diterapkan terhitung sejak Juli 2022, sehingga masih menjadi kebijakan baru yang berjalan sekitar 6 bulan.

Berikut ini disajikan tiga hasil riset yang dinilai relevan yang layak menjadi bahan diskusi untuk pengembangan Kurikulum Merdeka, yaitu:

Pertama, penelitian milik Rita Nunung Tri Kusyanti (2023) menyimpulkan berdasarkan kajiannya, laboratorium menjadi salah satu unsur pendukung utama pada pelaksanaan Kurikulum Merdeka khususnya pada mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Tempel. Hasilnya bahwa laboratorium fisika SMA Negeri 1 Tempel memiliki standarisasi yang sudah baik termasuk dalam digitalisasi informasi.

Kedua, riset milik Shofia Hattarina dkk. (2022). memberikan penegasan bahwa terdapat tiga hal yang menjadi kunci yang melandasi strategi implementasi Kurikulum Merdeka, yaitu Kurikulum Merdeka adalah pilihan, bukan menjadi sebuah kewajiban, implementasi kurikulum adalah proses belajar, dan dukungan implementasi kurikulum dilakukan secara komprehensif dan terus menerus (kontinyu).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Deni Sopiansyah dkk. (2021) layak untuk diperhatikan. Riset tersebut mengeksplorasi tentang tujuan utama dari implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan perguruan tinggi mampu bertujuan

untuk memberikan keleluasan kepada para mahasiswa untuk memilih mata kuliah sesuai dengan keinginan mereka, sehingga mendorong tata kelola proses pembelajaran yang lebih otonom dan fleksibel.

Masih minimnya riset yang berhubungan dengan pelaksanaan Kurikulum Merdeka, mengingat kebijakan ini masih bersifat baru dan sejumlah daerah masih dalam tahap sosialisasi, sebagian yang lain masih dalam tahap uji coba dan melaksanakannya. Di Kabupaten Sleman sendiri saat ini masih dalam tahap pelaksanaan awal, di mana kebijakan Kurikulum Merdeka ini bukan menjadi kewajiban, namun menjadi pilihan.

Untuk itu diperlukan pemetaan mengenai problematika yang dihadapi para guru dan kepala sekolah dalam mempersiapkan dan melaksanakan Kurikulum Merdeka di Kabupaten Sleman serta menemukan solusi atas beragam problematika yang dihadapi para guru dan kepala sekolah dalam mempersiapkan dan melaksanakan Kurikulum Merdeka di Kabupaten Sleman menjadi kebutuhan penting dan mendesak untuk dilakukan.

## **PELAKSANAAN KURIKULUM MERDEKA DI KABUPATEN SLEMAN**

Jumlah lembaga pendidikan dari tingkat PAUD, SD, hingga SMP di Kabupaten Sleman sebanyak 1.713 lembaga terdiri atas: 1.056 lembaga PAUD yang memiliki 33.873 murid dan 4.416 pendidik dan tenaga kependidikan; 513 lembaga SD yang memiliki 88.204 pelajar dan 6.132 pendidik dan tenaga kependidikan, dan 122 lembaga SMP yang memiliki 40.184 pelajar dan 3.125 pendidik dan tenaga kependidikan, serta 22 lembaga pendidikan kesetaraan yang memiliki 3.141 murid dan 279 pendidik dan tenaga pendidik (Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, 2021).

Jumlah lembaga pendidikan, pelajar, pendidik dan tenaga pendidikan dari tingkat PAUD, SD, hingga SMP di Kabupaten Sleman termasuk dalam kategori besar; jika dibandingkan dengan komposisi di kabupaten/kota lainnya di DIY. Dengan demikian, membutuhkan kemampuan tata kelola atau manajemen ekosistem pendidikan di Kabupaten Sleman.

### **Fakta-Fakta Tentang IKM di Kabupaten Sleman**

Berikut ini fakta-fakta yang ditemukan berhubungan dengan pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Kabupaten Sleman.

- Sebagian guru sudah memahami bagaimana regulasi terkait Kurikulum Merdeka, namun sebagian lain belum memahami berbagai regulasi mengenai Kurikulum Merdeka secara utuh.
- Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Kabupaten Sleman, sejatinya baru dimulai pada pertengahan Juli 2022; sehingga saat ini (baca: 12 Desember 2022) baru berjalan selama 5 bulan. Artinya belum mencapai waktu 1 semester sehingga belum memungkinkan untuk dilakukan evaluasi kegiatan secara utuh.

Yang bisa dilakukan saat ini adalah monitoring atau pemantauan program yang sedang berjalan.

- Guru masih dalam proses memahami Kurikulum Merdeka, tetapi masih ada juga para guru yang belum memahaminya dengan baik.
- Secara umum, mayoritas guru dinilai sudah cukup memahami regulasi terkait pelaksanaan Kurikulum Merdeka.
- Fakta lainnya, para guru dan Kepala Sekolah memiliki pemahaman yang belum mendalam dan masih terus mempelajari terkait bagaimana pelaksanaan Kurikulum Merdeka yang seharusnya. Para guru memanfaatkan komunitas dan *Platform* Merdeka Mengajar (PMM) untuk terus belajar. Hanya saja belum banyaknya guru penggerak yang dimiliki Sleman, menjadi salah satu kendala; sebab masih minimnya teladan.
- Semua peserta FGD setuju bahwa mereka belum sepenuhnya memahami dengan baik tentang bagaimana menjalankan Kurikulum Merdeka di sekolah masing-masing.
- Semua peserta FGD setuju bahwa mereka belum sepenuhnya memahami regulasi aturan dalam menjalankan Kurikulum Merdeka. Beberapa diantaranya menyebutkan bahwa mereka masih belajar untuk memahami regulasi tersebut.
- Sejumlah guru mengaku belum pernah membaca regulasinya, yang dibaca adalah pedoman untuk pelaksanaan.
- Terdapat SK terkait pelaksanaan Kurikulum Merdeka.
- KM berbeda dengan Kurikulum 13 karena di dalam Kurikulum Merdeka terdapat mata pelajaran pilihan seperti Seni Budaya dan Prakarya serta mata pelajaran tambahan berupa Informatika.
- Dalam pembelajarannya, beberapa guru mata pelajaran bergabung menjadi 1 fasilitator karena di setiap tahunnya sekolah perlu memilih 2-3 tema secara berbeda dari 7 tema. Seperti contoh: tema 1 (terdiri dari guru matematika, IPA), tema 2 (guru mata pelajaran lain).

- Kurikulum Merdeka berbasis proyek, (Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila/P5) siswa tidak hanya dituntut kognitif tetapi keterampilan juga. Dalam P5, guru mengampu secara bersama menjadi fasilitator tema yang dipilih sekolah.
- Untuk waktu pemilihan tema ditentukan oleh masing-masing sekolah, seperti dalam sekolah SMP 2 Sleman tema berganti setiap 3 bulan sekali.
- Didalam pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka tidak ada KKM seperti di K13, namun diganti dengan integral, misal nilai A=90-100, B=80-90.
- Kurikulum Merdeka yang paling berbeda adalah adanya proyek.
- Dalam Kurikulum Merdeka terdapat pelajaran intrakurikuler dan kokurikuler. Intrakurikuler adalah mata pelajaran biasa seperti Informatika. Sedangkan untuk mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya adalah mata pelajaran pilihan yang ditentukan oleh sekolah.
- Pembelajaran yang membedakan dengan K13 adalah adanya diferensiasi. Setiap siswa akan melewati asesmen diagnostic awal untuk *screening* gaya pembelajaran (kinestetik, auditorik, visual) yang dilakukan oleh BK sekolah sehingga guru dapat memetakan anak berdasar gaya belajarnya untuk difasilitasi media pembelajaran yang sesuai.

### **Persiapan Pihak Sekolah Dalam Menyambut IKM**

1. Sebelum terbitnya Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka pada Tahun Ajaran 2022/2023 pada Juli 2022, sekolah diberikan pilihan apakah akan menggunakan kurikulum Mandiri Berubah, Mandiri Belajar, atau Mandiri Berbagi. Sekolah mengisi survei kuesioner untuk melihat kurikulum yang bisa dilaksanakan oleh sekolah tersebut, meskipun tetap diberikan pilihan untuk melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan pilihan dan kemampuan sekolah masing-masing.

2. Selanjutnya terbit Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 044/H/KR/2022 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka pada Tahun Ajaran 2022/2023 per 12 Juli 2022, Di Sleman terdapat 690 sekolah yang melaksanakan IKM, baik dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, maupun PKBM. Artinya, sudah cukup banyak Lembaga pendidikan di Kabupaten Sleman yang tertarik menerapkan kurikulum model baru tersebut.
3. Berdasarkan hasil FGD, ditemukan fakta menarik bahwa di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, terkait kepeminatan pada kurikulum baru, pada awalnya baru TK Rejodani Ngaglik saja yang pertama kali mendaftarkan diri untuk pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Namun, sekolah memberanikan diri untuk mengikuti kurikulum yang baru untuk memerdekakan anak. Persiapan-persiapan yang dilakukan pihak sekolah untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka dilakukan dengan cara mengikuti webinar series serta mengikuti acuan dari *Platform Merdeka Mengajar* (PMM), melakukan bedah buku setiap bulan, serta mengikuti diklat. Sekolah juga menggerakkan komunitas internal sekolah "Sinau Bareng" sebanyak dua kali setiap bulan untuk lebih mendalami dan berbagi informasi antar guru terkait ilmu yang sudah didapatkan dari webinar dan diklat (semi otodidak). Dan yang paling pokok, justru belajar mandiri dari bekal yang sudah diberikan. Persiapan terkait pelaksanaan Kurikulum Merdeka di berbagai sekolah di Sleman tampak belum sepenuhnya dilakukan, terutama masih banyak sekolah yang belum atau tidak melakukan lokakarya atau bedah kurikulum baru di sekolah masing-masing. Hal tersebut menyebabkan dalam pelaksanaan Kurikulum baru tersebut, para guru masih meraba-raba terkait target akhir dari setiap mata pelajaran yang diampu.
4. Persiapan terkait pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Kabupaten Sleman dinilai mendadak oleh para kepala sekolah dan guru. Sekolah dinilai belum siap, tetapi pengawas sekolah

mengharuskan untuk segera menerapkan kurikulum baru sehingga mau tidak mau harus bersiap melaksanakannya. Akibatnya, karena perencanaan dan persiapan yang belum cukup memadai, pelaksanaannya masih penuh dengan kendala di lapangan.

5. Sejumlah narasumber dalam FGD, bahkan menginformasikan bahwa para guru kelas 4 juga masih belum memahami Kurikulum Merdeka dan belum ada bekal ketika diperintahkan untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka di sekolah.
6. Belum adanya formulasi Capaian Pembelajaran yang final dan tetap pada setiap sekolah sehingga guru harus belajar mandiri melalui merdeka belajar modul sehingga Capaian Pembelajaran yang belum final tetap diambil.
7. Di lapangan banyak guru yang mengaku persiapan pelaksanaan Kurikulum Merdeka dinilai masih gagap. Hal ini disebabkan masih minimnya referensi, pemahaman, dan menjadi barang baru yang perlu dikaji dan dipelajari lebih dalam lagi oleh masing-masing guru.
8. Kurikulum Merdeka membidik guru kelas 1 dan 4 SD dan juga kelas 7 SMP, serta kelas 10 SMA/K/MA dan membentuk wadah berbagi di sekolah masing-masing/komunitas belajar.
9. Mencari modul proyek supaya bisa masuk kelas 1 dan 4 SD. Saat ini para guru membuat buku dan modul ajar sendiri dan penilaian masih mengacu pada kurikulum lama, yaitu Kurikulum 2013.
10. Secara teknis, sekolah menyiapkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan seperti materi buku-buku, petunjuk dari pusat maupun kebijakan yang sifatnya insidental. Misalnya, guru kelas 1 SD akan mengerjakan modul, apa saja yang perlu harus dipersiapkan.
11. Tidak ada bedah kurikulum baru sebelum pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Padahal Langkah ini penting dalam rangka untuk memformulasikan Capaian Pembelajaran yang tetap dengan meminta masukan dan diskusi dengan semua guru, kepala



sekolah, dan para pihak; sebab antar mata pelajaran tidak bisa berdiri sendiri; namun saling mendukung dan melengkapi sebagaimana target akhir dari kurikulum ini yakni terlahirnya profil pelajar Pancasila yang memiliki berbagai kompetensi yang ketat.

12. Guru yang mengikuti workshop penyusunan kurikulum merdeka secara *online*, dapat lebih banyak belajar terkait kurikulum merdeka, sehingga lebih memahami ketika kepala sekolah bingung terkait survei pemilihan kurikulum bagi sekolah.
13. Selama ini tidak ada paksaan dan instruksi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman untuk harus mengikuti Kurikulum Merdeka. Dari salah satu peserta FGD menyebutkan, ada temuan oleh guru yang diminta melakukan sosialisasi di sekolah pada satu kecamatan di Kabupaten Kulonprogo yang menginstruksikan harus mengikuti Kurikulum Merdeka yakni pilihan nomor 2, Mandiri Berubah.
14. Pilihan yang ditetapkan sebaiknya sesuai dengan kesiapan sekolah, tidak ada paksaan dan instruksi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
15. Saat ini baru terdapat 3 sekolah di Kecamatan Sleman yang memilih kurikulum nomor 2 dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut.
16. Tahapan analisis konteks sebelum penetapan kurikulum, seharusnya dilakukan dengan berdiskusi antar guru dan komite sekolah, tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan karena tidak sempat dilakukan; mengingat waktu pelaksanaan yang terkesan "dipaksakan". Hal tersebut terjadi karena tiba-tiba muncul jadwal untuk melakukan review kurikulum. Akhirnya sekolah hanya melakukan diskusi internal guru dan kepala sekolah terkait penjelasan tiap-tiap kurikulum. Kemudian sekolah mendiskusikan apakah guru-guru siap untuk melaksanakan kurikulum yang dipilih kemudian mengunggah hasil diskusi terkait pada pilihan kurikulum yang akan dijalankan.

17. Semua peserta FGD setuju bahwa penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka dilaksanakan mulai dari Tahun Pelajaran 2022/2023 di sekitar bulan Juli atau Agustus 2022.
18. Beberapa peserta menjawab bahwa implementasi Kurikulum Merdeka dilakukan dengan menyesuaikan Capaian Pembelajaran (CP) yang telah ditentukan. Sebagian mengatakan bahwa buku ajar dan LKS yang berkaitan dengan materi Kurikulum Merdeka masih terbatas, sehingga masih ada yang memadupadankan dengan Kurikulum 2013 (K-13).

### **Alasan Memilih Menerapkan Kurikulum Merdeka**

Berikut ini disajikan berbagai alasan yang disampaikan para kepala sekolah dan guru yang memilih menerapkan Kurikulum Merdeka di Kabupaten Sleman:

- Sebagai guru penggerak, sedikit tahu mengenai Kurikulum Merdeka. Tahu mengenai pembelajaran di dalamnya seperti ada asesmen, budaya positif, dan sebagainya, memberikan aspirasi dan ide segar bagi kepala sekolah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah yang dikelolanya tersebut.
- Kurikulum Merdeka memberikan adanya kemudahan, kesederhanaan, dan keleluasaan dan kemerdekaan baik dari lembaga, anak, maupun guru.
- Sekolah boleh memilih topik-topik yang sesuai dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya dan tidak harus terikat dengan 12 topik yang ada di kurikulum-kurikulum sebelumnya.
- Adanya literasi yang kental, eksplorasi tinggi, dan anak diberikan kebebasan untuk memilih kegiatan dengan hasil akhir produk yang berbeda-beda tiap siswanya. Hal tersebut memungkinkan adanya optimalisasi terhadap bakat dan minat masing-masing siswa, sehingga bisa lebih optimal hasilnya.
- Anak tidak didekte dan guru dituntut untuk aktif (bukan mendikte) untuk menggunakan kalimat-kalimat pemantik dan *encouragement statement*.

- Melalui administrasi yang lebih sederhana, guru bisa memilih cara penilaian sesuai kemampuan guru masing-masing.
- Modul ajar dari *Platform Merdeka Mengajar* dijadikan acuan adopsi pembelajaran, tetapi tidak semua guru mampu membuat modul.
- Penilaian dianggap lebih leluasa.
- Tidak harus menggunakan ulangan tertulis sebagai bahan nilai.
- Dalam Kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran (CP) perlu diuraikan secara mandiri oleh guru menjadi TP dan ATP. Sementara di K-13, kompetensi dasar (KD) sudah terstruktur.
- Penyampaian materi di K-13 dilakukan secara tematik sementara di Kurikulum Merdeka dilakukan per mata pelajaran.
- Kompetensi Dasar (KD) pada K-13 dilakukan per tahun sementara Capaian Pembelajaran (CP) di Kurikulum Merdeka dilakukan per fase.
- Perlu adanya proyek yang diselesaikan siswa di tiap semester.

## **DAMPAK PELAKSANAAN KURIKULUM MERDEKA**

Kurikulum Merdeka di Kabupaten Sleman mulai diterapkan pada Juli 2022 untuk sebagian lembaga pendidikan yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 044/H/KR/2022 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka pada Tahun Ajaran 2022/2023 per 12 Juli 2022 per 12 Juli 2022. Setelah berjalan hampir 6 bulan, pelaksanaan Kurikulum Merdeka tersebut memberikan dampak positif antara lain:

- Bagi siswa, anak menjadi lebih merasa senang dan tidak terbebani dengan pembelajaran karena anak bermain sesuai dengan minat dan bakatnya.
- Guru menjadi lebih kreatif serta semangat dalam kegiatan belajar dan mengajar.
- Fleksibel.
- Guru lebih memahami sifat dan karakter murid-muridnya.
- Kurikulum Merdeka di Kabupaten Sleman dilaksanakan serentak bulan Juli 2022.
- Menurut sejumlah guru, Kurikulum Merdeka sudah diimplementasikan dengan cukup baik.
- Kurikulum Merdeka dilaksanakan berdasarkan Capaian Pembelajaran yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Guru menjadi lebih belajar dan lebih memahami terkait hal-hal non- teknis dari pembelajaran.
- Meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar.

- Siswa menjadi lebih dekat dengan guru, karena perhatian guru dituntun lebih intensif lagi memperhatikan kebutuhan dan bakat-keterampilan yang dimiliki masing-masing murid.
- Materi sudah dipahami oleh para siswa.
- Orang tua menjadi lebih aktif dalam kegiatan siswa.
- Guru menjadi semangat dan lebih aktif belajar.
- Fleksibel; guru diberikan ruang yang longgar sehingga beban transfer materi menjadi lebih ringan.
- Siswa juga menjadi tidak stres, karena muatan kurikulumnya disesuaikan dengan kondisi lokalitas.
- Pada satu sisi, guru harus membutuhkan waktu lebih untuk mengenal masing-masing siswa dan tidak semua guru mau melakukan itu.
- Guru memahami perbedaan pada Kurikulum 13 dan Kurikulum Merdeka.
- Tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan proyek dalam Kurikulum Merdeka.
- Kendala yang dimiliki beberapa sekolah antara lain koneksi internet karena letak geografis di pegunungan.
- Kendala umum yang dialami adalah belum adanya format penilaian yang ditetapkan oleh dinas sehingga guru kebingungan dalam penentuan standar mutu peserta didik.
- Guru telah melakukan pembelajaran terdiferensiasi dengan melaksanakan asesmen, serta melakukan proyek yang didukung berbagai mata pelajaran.
- Orang tua, dan komite mendukung adanya proyek yang dilakukan sekolah.
- Beberapa guru kesulitan membedakan bagaimana pengimplementasian Kurikulum Merdeka sehingga masih menggunakan pola pikir K13.

- Kurikulum Merdeka diterapkan pada tahun ajar 2022/2023 untuk kelas 7 sedangkan kelas 8 dan 9 masih menggunakan kurikulum 13 (K13).
- Dalam mata pelajaran IPS, sesama MGMP Sekolah yang sama-sama mengajar IPS di sekolah, mendiskusikan untuk pembuatan alur tujuan pembelajaran karena dalam Kurikulum Merdeka terdapat CP (Capaian Pembelajaran).
- Untuk pembelajaran diferensiasi masih dikembangkan baru 1x. Siswa ada yang menggunakan ppt, video, dan pengamatan di lingkungan sekolah. Hasil berupa *mindmap*, laporan, dan presentasi.
- Yang paling Anda rasakan hambatan: penyesuaian guru terkait perubahan dari K13 ke Kurikulum Merdeka mulai dari administrasi, dan penilaian karena sudah tidak ada KKM. Di hasil akhir anak bukan dilihat dari KKM mata pelajaran tetapi siswa kemampuan siswa dalam tiap pelajaran (paling mampu, mampu, dan tidak mampu). Tidak harus semua mata pelajaran siswa mampu.

### **Kendala dan Masalah**

- Untuk kelompok pelajar Taman Kanak-Kanak usia B (5-6 tahun), Kurikulum Merdeka sudah dapat dilaksanakan. Namun, untuk kelompok usia A (4-5 tahun) masih sangat kesulitan untuk dilaksanakan karena kelompok usia A masih dalam tahap usia penyesuaian, belajar dan fokus pada pembiasaan-pembiasaan yang tingkatnya sederhana.
- Terbatasnya sumber daya manusia dan dana untuk pelaksanaan proyek dan kurikulum.
- Kurangnya pendampingan-pendampingan dalam pemanfaatan *Platform* Merdeka Mengajar (PMM).
- Kurangnya jaringan sekolah yang sudah melaksanakan IKM untuk saling berbagi informasi dan pengalaman.

- Paradigma maupun pandangan para pendidik terkait Kurikulum Merdeka yang belum berkembang dari kurikulum lama (masih membutuhkan adaptasi dan perlu penyesuaian).
- Karena guru harus menyusun KOSP dan KTSP, guru merasa harus belajar cepat. Guru men-*download* ATP di PMM kemudian menganalisis dengan kesiapan dan kecocokan sekolah dan tetapkan bersama-sama. Seharusnya, untuk menentukan ATP, CP ditelaah bersama-sama oleh tiap fase yang sama (misal guru kelas 1 dan 2), tetapi hal tersebut tidak dilakukan karena terdapat guru yang akhirnya hanya *manut* dengan keputusan guru lain yang dirasa lebih memahami. Oleh karena itu, ATP yang idealnya adalah keputusan bersama, akhirnya hanya diputuskan oleh beberapa guru saja, mengingat waktu yang diberikan juga sedikit (*mepet*).
- Capaian Pembelajaran dan materi dalam buku tidak selaras. Buku terlambat datang, sehingga buku K-13 baru dipakai. Kecocokan buku yang baru sesuai dengan ATP masing-masing sekolah, tetapi tidak sesuai dengan CP yang baru. Hal tersebut disebabkan oleh adanya CP baru yang baru diluncurkan bulan Juni 2022 sedangkan Juli (mulai ajaran baru) Sudah harus dilaksanakan. Selain itu, pada saat itu, belum semua sekolah mendapatkan CP yang baru. Pada CP yang baru, materi tumbuhan tidak ada di CP terbaru untuk kelas 4 tetapi ada di buku yang baru, sehingga di tengah jalan, guru banting setir untuk mengajarkan materi indera sesuai CP yang baru. Materi indera tidak ada di buku yang baru sehingga guru menggunakan guru yang sama.
- PKM hanya untuk memetakan mutu, bukan sebagai alat asesmen atau evaluasi, tetapi kenyataannya dipraktikkan untuk itu.
- Karena guru lebih banyak belajar mandiri melalui PMM, kadang persepsi tiap guru berbeda-beda dalam memahami dan melaksanakan Kurikulum Merdeka.
- Modul ajar/administrasi kadang tidak cocok dengan sekolah/kondisi siswa.

- Asesmen untuk siswa dilakukan menggunakan baca tulis hitung, padahal pembelajaran tersebut tidak menjadi fokus utama dalam kurikulum yang baru.
- Belum selaras antara standar kelulusan TK dan standar masuk (pada beberapa) SD.
- Kondisi peserta didik juga belum lancar membaca dan menulis akibat pandemi, sehingga di awal pembelajaran kelas 1, fokus belajar dan membekali anak-anak keterampilan membaca, menulis, dan menghitung (Calistung). Modul mengambil dari Merdeka Mengajar, meskipun belum ada *template* dan baru sekadarnya saja. Modul dibuat apa adanya berdasarkan merdeka mengajar secara mandiri.
- Proyek P5 bukan hanya kewajiban bagi guru kelas, tetapi proyek baru dilakukan pada guru kelas.
- Terhambatnya SDM membuat apa yang diinginkan menteri, belum tentu berjalan sejalan dengan apa yang dipraktikkan.
- Pelaksanaan masih terasa berat untuk dilakukan karena diprediksikan terdapat sebanyak 10 anak dari setiap 28 anak belum bisa membaca dan menulis. Ditambah dengan adanya anak yang diduga berkebutuhan khusus.
- Kemampuan tiap siswa sangat beragam sehingga kesiapannya juga berbeda-beda.
- Adanya asesmen bersama di tingkat kecamatan/kabupaten membuat guru harus kejar target.
- Pelaksanaan P5 (proyek penguatan profil pelajar) belum bisa maksimal.
- Guru belum memahami penilaian untuk P5.
- Guru masih bingung dalam menentukan pembelajaran diferensiasi.
- Guru masih bingung terkait makna merdeka, apakah kemerdekaan K-13?
- Guru yang sudah *sepuh*/senior tidak begitu memahami IT sehingga bergantung pada guru yang masih muda.



- Guru merasa terkendala dalam menyiapkan modul ajar yang digunakan karena minimnya modul ajar.
- Guru masih belum memahami sistem penilaian dan rapot siswa.
- Guru kurang motivasi untuk mempelajari tentang IKM.
- Kegiatan P5 guru olahraga belum berjalan lancar.
- Secara umum, terkait pelaksanaan tidak begitu masalah, hanya saja perlu persiapan penuh yang lebih matang.
- Guru masih berada pada tahap penyesuaian.
- Sebagian peserta FGD setuju bahwa pelaksanaan Kurikulum Merdeka ini memungkinkan siswa untuk menjadi aktif dan berani dalam mengemukakan pembelajaran, tidak ada paksaan untuk siswa yang kemampuannya kurang, dan siswa dinilai lebih kreatif dengan adanya proyek P5. Salah satu guru juga menjelaskan bahwa dengan Kurikulum Merdeka siswa lebih fokus karena pembelajaran dilakukan per mata pelajaran (seperti Kurikulum KTSP). Meskipun begitu, terdapat guru yang khawatir terhadap hasil mutu yang berbeda akibat perbedaan pemahaman mengenai Kurikulum Merdeka ini di antara guru.

### **Kendala Bagi Siswa**

- Siswa masih dalam proses penyesuaian.
- Terkadang, siswa masih mengalami kesulitan karena terbiasa daring tetapi dituntut untuk belajar dan mencoba sendiri.
- Untuk kelas 4 aman, tetapi untuk kelas 1, siswa yang belum lancar membaca mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran dan sulit memahami materi yang telah dilakukan. Siswa kelas 1 juga kesulitan karena berhitung dengan angka besar, serta sulit membedakan hak dan kewajiban untuk mata pelajaran Pancasila.
- Materi pada Kurikulum Merdeka lebih kompleks.
- Pada siswa kelas 1 terkendala pada kemampuan baca tulis yang masih belum merata.

- Kesulitan dalam pembuatan proyek yang sesuai dengan tema yang telah ditentukan.
- Siswa merasa kesulitan dalam memahami mata pelajaran yang berbasis Kurikulum Merdeka.

### **Kendala Bagi Guru**

- Guru merasa kesulitan untuk menerapkan proyek yang sesuai dengan materi yang diajar.
- Guru merasa kesulitan untuk memfasilitasi siswa yang memiliki motivasi yang cukup rendah.
- Guru khawatir apabila materi yang diajarkan di sekolah tidak sesuai dengan TKM/ujian akhir yang dibuat oleh pemerintah kabupaten sehingga siswa merasa kesulitan saat menghadapi ujian.
- Belum adanya kejelasan Capaian Pembelajaran mengenai batas materi antar semester.
- Guru merasa kesulitan untuk menerapkan profil pelajar Pancasila dalam tiap mata pelajaran.
- Guru merasa pelatihan mengenai implementasi Kurikulum Merdeka masih kurang sehingga terdapat perbedaan persepsi dan pendapat di antara guru-guru sekolah mengenai cara implementasi Kurikulum Merdeka.
- Guru kesulitan untuk menentukan bagaimana bentuk penilaian dan raport dalam Kurikulum Merdeka ini.
- Kesulitan dalam memilih buku pendamping atau Lembar Kerja Siswa (LKS) yang arahnya sama dengan Kurikulum Merdeka.
- Kesulitan untuk menetapkan tugas proyek yang sesuai dengan materi ajar.
- Kesulitan untuk menerjemahkan CP dan profil Pancasila dalam pembelajaran.
- Kesulitan untuk menyusun modul ajar dan evaluasi pembelajaran.
- Kesulitan pada alur pembelajaran yang didasarkan pada fase-fase.

- Kesulitan untuk menerapkan bentuk penilaian yang dilakukan oleh guru.
- Kekhawatiran akan ujian akhir atau TKM yang mungkin bisa tidak sesuai dengan materi yang telah diajarkan.
- Dukungan buku ajar maupun LKS untuk siswa.
- Kebingungan guru akan pengimplementasian Kurikulum Merdeka akibat perbedaan persepsi yang dimiliki masing-masing guru.
- Guru merasa bingung dalam menyusun modul ajar, penilaian, evaluasi, hingga laporan hasil belajar.
- Kurangnya informasi yang disediakan oleh *Platform* Merdeka Mengajar.
- Anak diperbolehkan membawa HP membuat guru kesulitan mengontrol perilaku siswa menggunakan gadget.
- Untuk proyek masih bingung pembiayaan untuk memfasilitasi proyek.
- Sarpras yang belum memadai.
- Yang dibiayai oleh APBN adalah sekolah penggerak. Apabila memilih mandiri, biaya tetap mandiri.
- Lebih condong ke diferensiasi, di BK sudah dibantu tapi di kelas guru lebih ekstra dalam mengaplikasikan. Hasil diferensiasi mungkin bisa dibuat foto video ppt, tapi diferensiasi proses belajar siswa oleh guru masih kesulitan.
- Guru masih bingung dan merasa kesulitan karena informasi yang diberi kurang jelas seperti guru diperbolehkan tidak menghabiskan 1 bab yang penting anak tetap paham. Tetapi untuk asesmen sumatif (akhir semester), materi harus selesai sehingga bertolak belakang.
- Guru masih merasa bingung untuk menentukan tujuan pembelajaran karena Kurikulum Merdeka yang menekankan pada kemerdekaan tetapi masih diacu oleh buku paket yang hanya ditujukan untuk kelas 7. Sedangkan CP ditetapkan untuk kelas 7, 8, dan 9 sehingga guru dalam menentukan CP masih

berpedoman pada buku paket yang ditujukan untuk kelas 7. Dalam implementasinya guru masih menerapkan sesuai bab secara berurutan.

- Belum kelihatan bedanya.
- Untuk instruksi bisa paham, namun jika diberikan evaluasi masih belum tuntas. Bisa jadi karena SDM anak berbeda. Dasar SDM yang berbeda menyebabkan penerapan IKM juga berbeda.
- Anak-anak sulit mengejar materi. Jika ingin melanjutkan materi kadang siswa masih belum paham dengan materi sebelumnya padahal materi lain masih banyak yang belum diajarkan.

Kendala lainnya, sarana dan prasarana kurang sehingga untuk mengembangkan pembelajaran terkendala (LCD rusak), perihal materi masih acak-acakan, guru masih bingung dengan penerapan materi pembelajaran (seperti geografi yang diselesaikan terlebih dahulu kemudian pindah ke materi lain. Karena dalam 1 bab materi terkait ekonomi, sejarah, geografi, dan sosiologi masih jadi 1). Terkait penilaian yg sumatif dan proyek belum paham hanya mengikuti *form* yang diberikan oleh kurikulum terkait penilaian sumatif. Sedangkan untuk nilai proyek masih awang-awang.

### **Informasi dan Sosialisasi Kurikulum Merdeka**

Ketika penulisan buku ini tuntas, sejumlah sekolah di Kabupaten Sleman mengaku belum mendapatkan pendampingan khusus dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Informasi yang disampaikan juga belum utuh. Sementara dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman menyampaikan bahwa mereka sudah memberikan berbagai acara sosialisasi terkait implementasi Kurikulum Merdeka, namun karena hal tersebut masih menjadi kebijakan baru; cukup wajar jika belum semua pihak dapat memahaminya secara utuh. Masih membutuhkan waktu dan adaptasi untuk pelaksanaan dan kelancaran kebijakan kurikulum yang baru tersebut.

## **Fasilitas dan Infrastruktur**

- Ditilik dari ketersediaan fasilitas infrastruktur, belum ada bantuan infrasutruktur yang diberikan oleh para pihak ke sekolah terkait dukungan pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Padahal fasilitas dan infrastruktur yang dimiliki sekolah dan guru untuk melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagaimana tujuan akhir dari pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Banyak sekolah yang juga belum memiliki anggaran khusus untuk mendukung infrastruktur proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Solusi sementara yang dilakukan banyak sekolah dilakukan dengan mengambil dana dari SPP. Sebab dengan kebijakan tersebut, pelaksanaan Kurikulum Merdeka bisa dilaksanakan pada awal semester, sebab perencanaan berbagai sekolah belum cukup komprehensif, termasuk dari dukungan pendanaan.
- Guru merasa fasilitas dan infrastruktur untuk pelaksanaan Kurikulum Merdeka sudah memadai, tetapi untuk pelaksanaan P5 masih belum maksimal.
- Ada sekolah yang menyatakan sarana dan perangkat ajar belum siap.
- Peserta FGD setuju bahwa fasilitas serta infrastruktur yang disediakan belum sepenuhnya memadai untuk melaksanakan KBM dengan Kurikulum Merdeka. Beberapa juga mengemukakan bahwa mereka harus menyesuaikan pengimplementasian kurikulum dengan fasilitas dan infrastruktur yang sudah ada.
- Sudah mendapat fasilitas, tetapi belum memadai

## **TANGGAPAN GURU, SISWA, DAN ORANGTUA/ WALI MURID**

Berikut ini disajikan berbagai tanggapan dari para guru, siswa, dan orangtua/wali murid terkait IKM:

- Tanggapan dan respon guru relatif baik. Guru juga merasa senang dan dapat memberikan dampak yang sama bagi siswa.
- Guru mendukung dan antusias dengan Kurikulum Merdeka.
- Guru memberikan beberapa ide untuk KBM.
- Guru masih dalam proses memahami Kurikulum Merdeka.
- Guru masih kurang pelatihan secara daring,
- Guru merasa pelaksanaan Kurikulum Merdeka ini terlalu memaksakan, tetapi positifnya dapat memacu guru untuk belajar tentang IKM
- Terdapat guru yang menganggap kurikulum masih terlalu berat untuk siswa.
- Sebagian guru masih bingung untuk penerapan kurikulum di sekolah.
- Kebanyakan dari guru masih meraba-raba cara pengimplementasian Kurikulum Merdeka di sekolah sambil menerapkan kurikulum tersebut.
- Guru merasa perlu adanya pelatihan mengenai IKM agar guru lebih maksimal dalam melaksanakannya.
- Karena kurikulum masih baru, guru masih bingung dan masih meraba-raba. Namun seiring berjalannya waktu, guru sedikit menyesuaikan. Guru merasa dalam kegiatan proyek siswa merasa senang, banyak inovasi, dan kreativitas dari anak.
- Rata-rata respon guru kelas 7 ketika harus mengimplementasikan, respon guru adalah kenapa harus menerapkan KMB padahal

K-13 belum selesai dan belum paham. Guru bingung, siswa bingung, semua bingung.

Para siswa memberikan tanggapan yang relatif baik dan antusias mengikuti Kurikulum Merdeka. Para orangtua memberikan tanggapan dan respon yang sangat baik juga terhadap kehadiran Kurikulum Merdeka, meskipun ada kekhawatiran terkait hal tersebut. Hal tersebut terbukti saat para pengurus Komite Sekolah yang merasa khawatir akan pelaksanaan Kurikulum Merdeka, terutama nasib para murid pada sekolah yang belum atau tidak melaksanakan Kurikulum Merdeka.

Agar lebih memahami mengenai Implementasi Kurikulum Merdeka, para guru harus lebih banyak mengikuti pelatihan, bedah buku, serta aktif dalam komunitas. Mereka juga dituntut untuk aktif secara mandiri untuk mencari referensi, termasuk melalui *platform* Merdeka Mengajar. Untuk itu, para guru harus melek teknologi dan informasi; termasuk dalam tata kelola teknologi Internet. Sementara ini jumlah guru di Kabupaten Sleman yang sudah masuk usia lebih dari 50 tahun persentasenya sudah cukup besar. Artinya, melatih atau membiasakan para guru "senior di atas untuk melek teknologi informasi menjadi tantangan besar yang harus dilakukan.

Sampai sekarang, masih banyak lembaga pendidikan di Kabupaten Sleman yang belum melaksanakan Kurikulum Merdeka. Seperti misalnya TK IT Salman Al Farisi 2 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta baru akan melaksanakan Kurikulum Merdeka pada awal Januari 2023. Tentu saja persiapan berbagai aspek mulai dari kurikulum, SDM (guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan murid), infrastruktur, dukungan pendanaan, dan orangtua/wali murid serta para pihak berkepentingan lainnya dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka menjadi salah satu kunci akan kesuksesan pelaksanaan IKM.

### **Tanggapan Siswa**

- Awalnya siswa merasa kesulitan, tetapi seiring waktu siswa sudah mulai mengerti.

- Siswa senang dan mendukung Kurikulum Merdeka.
- Siswa masih menyesuaikan dengan Kurikulum Merdeka.
- Siswa menjadi lebih banyak aktivitas yang variatif
- Siswa cenderung “ngikut” dengan aturan. Karena pandemi 2 tahun, anak menjadi tidak responsif dan sangat cuek, kepekaan sosial sangat kurang.

### **Tanggapan Orang Tua Siswa**

- Orang tua senang dan mendukung Kurikulum Merdeka.
- Antusias
- Terdapat orang tua yang masih sulit mendampingi belajar putra putrinya
- Orang tua merasa pendampingan siswa lebih mudah dan sederhana
- Orang tua siswa kelas 1 lebih mudah dalam pendampingan belajar,
- Orang tua siswa cukup terkejut, karena penilaian dan sistem belajar selama ini *academic oriented*, sedangkan kurikulum baru tidak demikian.
- Hampir sama dengan tanggapan siswa, orang tua siswa cenderung tidak terlalu merespon perubahan kurikulum ini. Meskipun begitu, terdapat beberapa orangtua yang mengeluh kebingungan dalam memahami perbedaan Kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh sekolah.
- Belum ada respon, karena belum ada pertemuan sehingga belum tahu.

### **Persiapan Pihak Sekolah**

- Saat ini berbagai sekolah masih terus belajar dan mengikuti pelatihan terkait Kurikulum Merdeka. Mengingat IKM masih menjadi hal baru.



- Saat ini, sekolah masih dalam proses penyusunan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) dan masih menyelesaikan modul-modul di *Platform* Merdeka Mengajar.

### **Hambatan Pelaksanaan Kurikulum 2013**

- Salah satu kelemahan dari Kurikulum 2013 (K-13) adalah, adanya kegiatan belajar mengajar yang terbentur dengan tema dan masih ada kesulitan untuk adaptasinya. Kelemahan tersebut bisa disempurnakan dengan kehadiran.
- Penilaiannya rumit sehingga perlu penyederhanaan dalam hal penilaian

### **Penyelesaian Masalah Dari Kendala yang Dihadapi**

- Diskusi dan musyawarah dengan semua guru.
- Mengikuti berbagai pelatihan dan *web-series*.
- Adanya dukungan sukarela dari orangtua siswa.
- Membagi peran bersama dengan fokus masing-masing, sehingga makin banyak guru yang lebih terdampak positif dengan adanya ruang dan tanggung jawab dari guru-guru terkait.

### **Pelaksanaan Evaluasi**

Karena semester belum berakhir, proses evaluasi masih belum dilakukan

### **Sosialisasi dan Pemahaman Terkait Kurikulum Merdeka**

- Berbagai sekolah sudah mendapatkan sosialisasi terkait Kurikulum Merdeka, tetapi belum semua guru dapat memahami dengan baik esensi Kurikulum Merdeka.
- Keunggulan yang dimiliki Kurikulum Merdeka yaitu: adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila; dan materi ajarnya lebih fokus pada Capaian Pembelajaran dan juga Alur Tujuan Pembelajarannya.

- Sekolah belum mendapatkan sosialisasi mengenai Kurikulum Merdeka sehingga belum memahami Kurikulum Merdeka.
- Sebagian besar peserta FGD setuju bahwa mereka belum sepenuhnya mendapatkan informasi dan sosialisasi terkait Kurikulum Merdeka. Sebagian kecil lainnya mengaku sudah pernah mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh yayasan sekolah terkait, kegiatan dari KKG daerah setempat, *Platform Merdeka Mengajar* (PMM) hingga webinar yang diikuti secara mandiri oleh guru.
- Sudah ada *workshop* terkait Kurikulum Merdeka.

### **Masalah Dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka**

Berikut ini disajikan berbagai masalah dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka:

- Belum ada hubungan atau wadah bagi 45 sekolah yang melaksanakan Kurikulum Merdeka di Kabupaten Sleman.
- Perlu adanya pendampingan PMM dengan dimaksimalkan, dan memperluas target.
- Dibutuhkan pendampingan dari dinas terkait.
- Banyak produk yang sudah dihasilkan oleh siswa dan guru, tetapi belum ada pendampingan dan masih ada berbagai kendala untuk memasukkan
- Pelatihan dari dinas, pendampingan rutin dan masif.
- Pembuatan rapot (keseragaman dan format) dan pendampingannya; diberikan gambaran.
- Penyesuaian jadwal dengan kelas 2-3-5-6.
- Penyesuaian dengan banyaknya kegiatan sekolah.
- Belum adanya diskusi terkait CP, TP, ATP yang dipelajari sehingga dikhawatirkan ada perbedaan materi dengan TKM yang akan dilaksanakan.
- Pemahaman guru mengenai IKM yang berbeda sesuai dengan kemampuan guru masing-masing dalam mencari informasi.

- Manajemen waktu yang dirasa berbenturan dengan budaya karakter (adab) yang unik sekolah kami gunakan.
- Masih bingung.
- Guru merasa seperti robot.
- Untuk guru kelas 8, 9 masih belum memahami terkait Kurikulum Merdeka sehingga hanya memberikan kewenangan untuk guru kelas 7. Seolah-olah guru-guru kelas 7 saja yang harus mempelajari Kurikulum Merdeka. Guru masih belum memahami serius terkait Implementasi Kurikulum Merdeka, terkesan acuh yang disebabkan karena beban ajar yang banyak jumlahnya.

### **Solusi/Penyelesaian Masalah Dari Kendala yang Dihadapi**

- Mengadakan forum diskusi untuk bertukar pengalaman dan informasi dengan teman guru yang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka.
- Perlu adanya dorongan bagi guru untuk menyelesaikan pembelajaran mandiri melalui *Platform* Merdeka Mengajar.
- Diadakan kegiatan pelatihan secara tatap muka dalam penyamaan pemahaman dan persepsi mengenai Kurikulum Merdeka yang mendalam.
- Ada tim, dengan melakukan briefing yang membahas terkait Kurikulum Merdeka utamanya proyek (selama ini sudah 3 kali secara spontanitas).
- Sebaiknya guru kelas 8 dan 9 juga perlu disiapkan dari sekarang dalam menguasai Kurikulum Merdeka.

### **Kekhasan Kurikulum Merdeka Jika Dibandingkan Dengan Kurikulum Lama**

- Dulu materi pelajaran berupa tema-tema sekarang dijadikan satu. Perbedaannya ada di proyek yang harus ada baik reguler atau blok. Perbedaan lain mengenai materi.
- Bapak/ibu guru bekerja penuh selama 8 jam. Pembelajaran biasa jam 1-3, dilanjutkan proyek pada jam 4-8.

- Anak lebih senang dengan proyek karena mendatangkan tamu dari luar (misal: Brimob). Tetapi KBM proyek juga mendatangkan rasa bosan bagi siswa dikarenakan proyek dilaksanakan setiap Jumat, Sabtu selama 1 bulan, masih baru jadi masih beradaptasi.
- Program dinas dikembangkan dengan video yang lebih praktikal, memberikan video *role model*, bukan hanya teoritis saja, sehingga para guru lebih mendapatkan gambaran.
- Komunitas belajar: diharapkan dinas pendidikan mendukung dan dapat memaksimalkannya sebagai media pendampingan.

### **Dampak**

- Mutu KBM: masih sulit untuk menentukan, karena baru berjalan setengah semester. Guru masih proses belajar menggunakan *platform* dan masih meraba-raba
- Belum terlihat jelas, tetapi di saat KBM proyek, anak lebih senang karena kreativitas anak dapat dituangkan. Saat KBM siswanya aktif misal diminta berkelompok sudah bagus, banyak positifnya. Namun, guru masih bingung, merdeka tapi masih diminta banyak hal.
- SDM menengah ke bawah sehingga belajar masih harus dipaksa/dipandu. Apabila diartikan merdeka dengan arti sesungguhnya siswa dapat tidak teratur. Namun terdapat peningkatan dalam pembelajaran karakter dari K13. Misal ada pembiasaan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menggunakan Bahasa Jawa setiap seminggu sekali.

### **Sikap dan Kebijakan Para Pemangku Kepentingan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman**

Dari 511 SD se-Kabupaten Sleman, yang sudah mendaftarkan sebagai sekolah pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka itu baru 484 SD atau 94,7 persen. Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mendorong sekolah pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka untuk memanfaatkan secara optimal *Platform* Merdeka Mengajar. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sendiri memiliki

akun yang bisa mendeteksi atau melihat “*dashboard*” Implementasi Kurikulum Merdeka sehingga memudahkan dalam mengetahui tingkat keaktifan sekolah-sekolah di Kabupaten Sleman dalam memanfaatkan PMM. Pada awalnya, yang terlihat banyak guru yang baru *log ini* atau sekadar mendaftar saja; namun belum mulai belajar menggunakannya. Sekarang, setelah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman melaksanakan kegiatan Bimtek terkait pemanfaatan PMM dalam rangka mendukung IKM, sekarang dapat dikatakan banyak guru yang khususnya untuk jenjang SD ini sudah mulai belajar.

Bimbingan teknis penggunaan PMM akan ditindaklanjuti dengan aksi nyata. Karena memang masih menjadi hal baru, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mengajari para guru untuk belajar bersama dalam memanfaatkan berbagai fitur PMM. Kerjasama dengan para pengawas sekolah, guru penggerak untuk mendampingi para guru dalam memanfaatkan fitur-fitur PMM tersebut agar lebih optimal hasilnya. Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam rangka pemahaman terkait Kurikulum Merdeka.

Salah satu peta masalah besar dalam pelaksanaan Kebijakan Kurikulum Merdeka di Kabupaten Sleman yaitu masalah kesiapan sumber daya manusia sebab sebagian guru ASN di Kabupaten Sleman sudah berusia lebih dari 50 tahun. Di mana dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka, para guru dituntut memiliki fleksibilitas khususnya dalam mengakses berbagai sumber-sumber literatur dan sebagainya. Sementara adanya rentang usia yang sudah lebih dari 50 tahun, dapat mengakibatkan para guru menjadi gagap dalam menggunakan perangkat teknologi informasi seperti laptop, komputer, HP, aplikasi *online*, *website*, dan sebagainya.

Strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman untuk mengatasi masalah tersebut yakni dengan mengadakan bimbingan teknis dan pelatihan secara berkala. Ke depan, para Kepala Sekolah didorong untuk mengadakan kegiatan belajar bersama yang melibatkan seluruh warga sekolah minimal

seminggu sekali. Kegiatan tersebut bisa mengupas tuntas serba-serbi terkait PMM. Pengawas sekolah diharapkan dapat memonitor kegiatan tersebut. Forum tersebut dinilai penting sebagai sarana untuk saling berbagi, saling mengisi, dan saling melengkapi. Di samping itu, Dinas Pendidikan juga menginstruksikan kepada seluruh lembaga pendidikan dapat memanfaatkan dana BOS untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Dengan demikian, para guru dan pelajar yang melaksanakan Kurikulum Merdeka bisa terfasilitasi dengan baik.

Misalnya para guru yang tidak mempunyai laptop, paket data untuk mengakses Internet dapat difasilitasi melalui dana BOS. Sudah menjadi kewajiban bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman untuk mendampingi secara intensif terhadap para guru dalam memanfaatkan berbagai fitur-fitur yang ada dalam PMM sehingga menjadi lebih mengetahui dan memahaminya.

Saat ini di Kabupaten Sleman sudah tersebar para guru penggerak pada 17 kecamatan/kapanewon; sebelumnya sudah diadakan Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum Merdeka dan akan terus dilakukan diseminasi secara berkala.

Prinsip utama dalam kegiatan tersebut, bukan untuk mengejar kuantitas atau kejar tayang; melainkan kejar faham. Jadi tingkat pemahaman dari para guru terkait IKM dan PMM ini yang perlu diprioritaskan. Yang selama ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman untuk memonitor pemanfaatan PMM yakni dilakukan setiap hari Rabu. Deteksinya, guru yang sudah aktif memanfaatkan PMM akan ditandai warna biru diaplikasi. Melalui kerjasama juga dengan Balai Besar Guru Penggerak, dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan untuk menyukseskan Merdeka Belajar episode 15 yang saat ini tengah berjalan.

Data menunjukkan saat ini sudah sebanyak 484 SD di Kabupaten Sleman yang melaksanakan IKM, dengan rincian sebanyak 301 SD memiliki pilihan pertama (Mandiri Belajar) dan 175 SD dengan pilihan kedua (Mandiri Berubah); sementara hanya 8 SD saja yang

memilih pilihan ketiga (Mandiri Berbagi). Dalam teknis pemilihan opsi atau model IKM, Pemerintah Daerah tidak melakukan intervensi terkait kesiapan masing-masing sekolah berdasarkan kemampuan masing-masing sekolah, sehingga proses tersebut menjadi sangat penting.

Jadi tidak ada intervensi dari dinas dalam menentukan pilihan bagi sekolah-sekolah, misalnya diminta wajib untuk melaksanakan IKM minimal pilihan 2. Dinas menghargai proses. Faktanya, masih banyak ditemukan adanya sekolah yang kurang tepat dapat memilih jenis pilihan pelaksanaan IKM. Hal tersebut bisa dimungkinkan karena tingkat pemahaman dari sekolah yang belum utuh terkait konsekuensi masing-masing pilihan tersebut. Targetnya, pada tahun 2023 dan 2024, sekolah-sekolah yang sama sekali belum menerapkan IKM bisa melakukannya; sedangkan sekolah-sekolah yang sudah memilih dan menerapkan IKM pilihan ke-1 (Mandiri Belajar) bisa meningkatkan tingkatannya ke Mandiri Berubah (pilihan ke-2); sedangkan yang sudah memilih IKM opsi kedua (Mandiri Berubah), semuanya bisa menuju kepada IKM Mandiri Berbagi.

Yang berlaku selama ini memang IKM tidak wajib diterapkan di seluruh sekolah; tetapi IKM menjadi wajib bagi sekolah penggerak. Sementara ini jumlah sekolah penggerak di Kabupaten Sleman juga masih terbatas. Kabupaten Sleman tercatat sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan ke-3 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Angkatan pertama dilakukan oleh Kabupaten Gunungkidul; sedangkan Angkatan kedua dilakukan oleh Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta. Dalam konteks kebijakan anggaran, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, dukungan anggaran dilakukan dengan mengedepankan pada manajemen berbasis sekolah, di mana pihak sekolah menuangkan program kegiatannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Sehingga masing-masing sekolah memiliki keunikan dan kekhasan sendiri dalam mengelola keuangan. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman hanya mengintervensi dari aspek upaya peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Dalam rangka pelaksanaan Kurikulum Merdeka, karena kebijakan ini menjadi suatu hal baru sehingga intervensi Dinas untuk skala prioritas, yaitu pertama peningkatan kualitas PTK. Maka program kegiatan berupa *in house training*, workshop, bimbingan teknis dan semacamnya menjadi kebutuhan mendesak untuk kepentingan dan kelancaran program tersebut.

Dengan jalan demikian, IKM menjadi jalan panjang untuk meningkatkan performa dan kinerja dari masing-masing pendidik dan tenaga kependidikan. Bahkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sendiri, kebijakan terkait konstruksi anggaran, juga akan disesuaikan untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka tersebut.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman melakukan perubahan anggaran. Ketika dinilai dari kegiatan yang dalam monitoring dan evaluasinya ternyata hasilnya kurang bermanfaat, dengan melihat tuntutan zaman yang terus bergerak cepat, sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman memberanikan diri mengalihkan tiga kegiatannya untuk mensukseskan PMM dalam mendukung IKM. Salah satunya yang sudah dilakukan adalah dengan menggelar bimbingan teknis, penguatan PMM dalam rangka mendukung IKM tingkat Kapanewon se-Kabupaten Sleman.

Targetnya, dapat melibatkan seluruh pengawas sekolah di masing-masing Kapanewon dan juga satu guru pendamping/penggerak dan melibatkan para guru. Langkah selanjutnya, para guru yang sudah terlibat dalam Bimtek penggunaan PMM tersebut dapat melakukan desiminasi kepada teman-teman guru lainnya. Gerakan tersebut akan terus bergerak dan berkembang, secara otomatis ke depan semua guru akan memahami dengan utuh esensi akhir dari IKM. Hal lain yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman juga melakukan perubahan anggaran yakni dengan mengadakan kegiatan Bimtek Penguatan PMM dalam rangka mendukung IKM tingkat Kabupaten Sleman. Sebagai contoh konkrit, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mengadakan *Sleman School Expo* pada 28 November 2022 di Hotel Prima SR Sleman



Yogyakarta. Hal tersebut selaras dengan Kurikulum Merdeka yang tengah gencar dilakukan di Kabupaten Sleman.

Sebagai refleksi bersama, hasil literasi numerasi khususnya jenjang SD di Kabupaten Sleman masih kurang literasi. Sebab nilainya masih sekitar 1,97; kemudian numerasinya 1,76. Kemudian Dinas menganggarkan lagi untuk mengatasi masalah tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman akan mengadakan bimbingan teknis Penguatan Literasi dan Numerasi, dengan jumlah pesertanya ada 86 orang karena masing-masing Kapanewon sebanyak 5 orang guru yang terpilih. Langkah selanjutnya, akan digelar yang mengikuti kegiatan di atas adalah para guru kelas 3 SD untuk persiapan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Kebijakan yang dipegang oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yakni dengan melihat kebutuhan di lapangan terutama yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah di Kabupaten Sleman.

Kalau untuk sekolah itu kebijakan masing-masing sekolah, hanya saja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman melakukan intervensi untuk peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikannya dan juga sarana prasarana yang dibutuhkan agar ke depan program yang disusun tepat sasaran.

### **Kendala dan Hambatan yang Dialami Dalam Pelaksanaan IKM**

Adanya berbagai kendala yang menyerimpung pelaksanaan IKM di Kabupaten Sleman dinilai masih dalam batas yang wajar. Sebab, untuk dapat mengubah paradigma atau mindset para guru untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan kurikulum memang membutuhkan perjuangan dan ikhtiar yang besar. Berbagai pihak harus mendorong dan berkomitmen kuat dalam menyukseskan adanya Kurikulum Merdeka yang sudah menjadi kebijakan nasional bidang pendidikan. Untuk dapat mengubah perspektif, paradigma, atau mindset setiap orang membutuhkan motivasi dari diri sendiri untuk mau berubah, mau mengikuti tuntutan perkembangan zaman. Karena saat ini kita tidak bisa lagi bersikap seperti guru pada zaman dulu. Jadi kendala internalnya, sejatinya ada pada guru

dan kepala sekolahnya. Untuk itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mendorong dan memfasilitasi adanya perubahan yang ke arah positif tersebut. Prinsip belajar bersama menjadi kebutuhan yang mendesak.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sendiri yang menjadi representasi pemerintah pusat dalam ekosistem pendidikan nasional tidak pernah kurangnya dalam memberikan fasilitasi yang memadai terkait kesuksesan IKM tersebut. Kalau berbagai fasilitas tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh para pihak yang memiliki kepentingan terhadap dunia pendidikan, jelas akan rugi dan "*eman-eman*".

Sebagaimana diketahui, PMM itu sudah merupakan situs atau aplikasi yang sangat komplit; mampu mempertemukan berbagai kebutuhan yang penting antara para guru dan murid se-Indonesia dalam satu *platform* yang sudah terintegrasi. Justru yang menjadi kunci penting dalam kesuksesan IKM yakni upaya diri untuk mengubah *mindset* dari setiap guru zaman *old* menjadi guru yang serba melek teknologi informasi. Mereka bisa menjadi guru pembelajar, guru peneliti, dan guru profesional yang terus mengembangkan keprofesiannya sehingga mampu mendidik para peserta didik memiliki kompetensi sesuai standar profil pelajar Pancasila.

Wilayah Kabupaten Sleman yang terdiri 17 kapanewon memiliki wilayah yang cukup luas, namun dinilai masih terjangkau dengan berbagai moda; sedangkan akses Internet juga sudah hampir merata di berbagai kecamatan se-Sleman. Akses terhadap PMM dengan hadirnya akses Internet yang memadai di Kabupaten Sleman, diharapkan mudah dijangkau oleh para guru maupun para pelajar di Kabupaten Sleman. Dengan begitu, target pelaksanaan IKM bisa tercapai dengan baik.

Berdasarkan hasil analisis Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, selama mengadakan bimbingan teknis tingkat Kabupaten Sleman beberapa waktu lalu, masih banyak dijumpai adanya para peserta

bimtek yang menanyakan mengenai apakah itu PMM? Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dari para guru terkait IKM dan PMM masih cukup rendah. Berarti dibutuhkan sosialisasi yang lebih masif lagi berhubungan dengan IKM di lingkungan para guru se-Kabupaten Sleman. Kebijakan lainnya, kami mengundang para guru penggerak yang sudah memahami terkait IKM untuk menjadi narasumber berbagai kegiatan tersebut.

Saat ini Merdeka Belajar sudah masuk episode ke-22, artinya sudah cukup panjang waktu yang dijalankan program ini. Kabupaten Sleman baru mengeksekusi program IKM pada Juli 2022, artinya sudah termasuk kelompok akhir. Kebijakan Kemenristekdikti mengajak berbagai sekolah untuk berlari cepat melalui IKM.

Salah satu kebijakan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dalam rangka untuk menyukseskan IKM yakni dengan menggandeng Balai Penjamin Mutu Pendidikan Yogyakarta mengadakan Bimbingan Teknis IKM dengan mengundang seluruh pengawas sekolah dari jenjang PAUD, SD, hingga SMP.

Bimtek IKM dilakukan agar terjadi pemerataan dan memberikan ruang kesempatan kepada sekolah yang belum mendapat pendampingan. Banyak kegiatan Webinar secara luring maupun daring juga diselenggarakan oleh Balai Besar Guru Penggerak. Jadi, sebenarnya Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sejatinya tidak kurang dalam mendukung dan mensosialisasikan kegiatan IKM. Peran para pengawas sekolah, para kepala sekolah untuk memberi motivasi, semangat kepada sekolah binaannya menjadi kunci bagi kesuksesan IKM.

Langkah yang harus dilakukan untuk menyukseskan IKM yakni dengan mengubah *mindset* semua warga sekolah. Prinsipnya Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman akan memfasilitasi berbagai kebutuhan yang dibutuhkan guru-guru sesuai dengan tuntutan kebutuhannya. Studi banding ke Mojokerto Jawa Timur yang pernah dilakukan juga menjadi bahan referensi untuk pelaksanaan IKM di Kabupaten Sleman.

Dari sebanyak 6.132 pendidik dan tenaga kependidikan se-Sleman, jumlah guru yang sudah lulus sebagai guru penggerak sebanyak 59 khususnya di tingkat SD, tapi sekarang juga masih proses jadi bisa mencapai 100-an guru penggerak. Mereka diharapkan mampu menjadi penggerak dalam melaksanakan IKM pada sekolah masing-masing. Mereka diharapkan dapat mendampingi para guru non penggerak pada sekolah masing-masing maupun pada sekolah lainnya. Kolaborasi dengan Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman dalam melakukan kajian mengenai implementasi Kurikulum Merdeka menjadi sangat penting untuk kesuksesan IKM di Kabupaten Sleman. Kolaborasi bersama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman, Balai Besar Guru Penggerak, dan Balai Penjamin Mutu Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyukseskan IKM harus dilakukan demi pencapaian yang lebih baik lagi.

Kendala yang terlihat selama ini, masih banyak pihak yang belum memahami dengan baik terkait dengan IKM. Untuk itu, pekerjaan pertama dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yakni mengadakan sosialisasi secara intensif terkait IKM. Bukan hanya dengan cara kejar tayang saja, melainkan dengan kejar faham. Para guru membutuhkan sarana dan prasarana untuk mendukung IKM, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman juga akan berusaha optimal untuk memfasilitasinya.

Salah satunya ini kemarin untuk rencana tindak lanjut pada saat guru itu nonton video itu mereka harus membuat ringkasan. Logikanya mereka kalau membuat ringkasan tidak main *skip* atau loncat-loncat menontonnya, tidak langsung dihapus supaya mengejar target. Jadi nanti guru penggerak akan dioptimalkan dan diberdayakan juga.

Hasil kajian ini sangat diharapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dalam rangka untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang mesti ditempuh untuk menyukseskan pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Tahun 2023, ditargetkan jumlah sekolah yang melaksanakan IKM semakin banyak dan yang memilih opsi ke-2 dan

ke-3 juga semakin besar. Dengan demikian, luaran dari IKM ini bisa bermanfaat besar dan meningkatkan pemerataan mutu pendidikan dan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Perlu penyusunan strategi yang lebih baik lagi dan kolaborasi berbagai pihak untuk menyukseskan IKM.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Drs. H. Ery Widaryana, M.M, pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Kabupaten Sleman, sesuai keputusan kementerian dimulai pada 2022/2023. Terdapat 3 tipe yang diterapkan; Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi. Di Kabupaten Sleman, sebagian besar sekolah memilih opsi kedua, yakni Mandiri Berubah.

Kaitannya dengan pelaksanaan, sudah diterjunkan para pengawas sekolah baik TK/SD/SMP untuk memantau pelaksanaan di sekolah-sekolah termasuk bagaimana implementasinya di lapangan. Diharapkan pengawas sekolah bisa memberikan materinya kepada sekolah-sekolah secara komprehensif dan menarik. Sudah dilakukan sosialisasi masif di masing-masing kapanewon.

Dilakukan juga pemantauan melalui *dashboard* PMM. Kabupaten Sleman sudah masuk kategori 100 persen belajar melalui PMM. Pada awal November 2022, tercatat masih 50-an SD yg melakukannya, tetapi dilakukan penggenjotan, dan dari laporan BPMP; saat ini semua sekolah sudah belajar dengan memanfaatkan melalui PMM 100 persen. Secara masif, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mendampingi terus berbagai sekolah yang ada.

Salah satu hasil FGD terkait pelaksanaan IKM, di mana Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman pernah mengundang 45 kepala sekolah maupun guru, ditemukan fakta menarik bahwa kepala sekolah maupun guru, yang memegang kunci pelaksanaan IKM, ternyata informasi mengenai Kurikulum Merdeka ini belum utuh.

Merespons hal tersebut, diakui bahwa sosialisasi IKM belum merata. Ada beberapa guru yang belum pernah terlibat diundang sosialisasi di Hotel Prima SR Sleman sebanyak 280-an guru, di mana mereka memang orang-orang yang belum pernah terundang.

Setelah diundang, mereka baru mengaku memahami dengan baik mengenai IKM. Prioritas ke depan adalah pemerataan sosialisasi. Selama ini, pemerintah pusat melakukan sosialisasi dan pelatihan hanya kepada guru-guru yang sudah terundang ke mana-mana. Oleh karena itu, sasaran peserta sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan IKM dan pemanfaatan PMM harus berganti-ganti.

Pada umumnya sosialisasi yang dilakukan oleh pusat (Kemendikbudristekdikti) hanya mengundang para guru yang sudah sering mendapatkan penataran. Ke depan harapannya semua guru mendapatkan informasi yang sama.

Jumlah guru penggerak yang ada di Kabupaten Sleman sekitar 124 orang yang lolos tahap pertama; pada tahap kedua, ada sekitar 200 orang; sehingga saat ini Sleman memiliki 324 guru penggerak. Dari angka tersebut, perbandingan guru yang lolos sebagai guru penggerak dengan guru lainnya masih sangat minim. Solusi yang bisa dilakukan, guru penggerak nantinya akan lebih diefektifkan untuk dijadikan sebagai narasumber untuk sosialisasi IKM pada setiap kapanewon.

Selama ini yang sudah dilakukan, sosialisasi mengenai IKM lebih banyak dilakukan kepada para kepala sekolah. Hal tersebut dinilai kurang efektif. Sosialisasi kepada para guru langsung harus lebih diprioritaskan karena merekalah yang sejatinya menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan IKM.

Secara bertahap, kaitannya dengan Kurikulum Merdeka di Kabupaten Sleman, sudah dapat dikatakan hampir seluruh sekolah di Sleman sudah melaksanakan IKM pada opsi pertama dan kedua. Banyak sekolah yang mengambil IKM dengan opsi kedua, karena dinilai lebih luwes sebab mereka masih bisa melaksanakan IKM dengan tetap mengadopsi kurikulum 2013.

Kurikulum Merdeka wajib bagi sekolah-sekolah yang sudah dinyatakan sebagai sekolah penggerak. Sementara jumlah sekolah penggerak di Kabupaten Sleman masih terbatas jumlahnya. Dengan demikian, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman bahkan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI tidak bisa memaksakan kepada sekolah-sekolah untuk menerapkan IKM.

Mengapa sekolah-sekolah di Kabupaten Sleman baru menerapkan IKM pada Juli 2022, termasuk dalam kelompok yang terakhir dalam menerapkan. Sebenarnya tidak ada alasan khusus mengapa Sleman dinomorakhirkan di DIY. Tetapi pada waktu itu, saat koordinasi di awal, sekolah-sekolah yang harus melaksanakan Kurikulum Merdeka adalah sekolah yang sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak.

Sementara di Sleman, penetapan sekolah penggerak baru dilakukan pada Juni 2022 kemarin. Sehingga kalau sekolah yang sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak, wajib menerapkan Kurikulum Merdeka. Kebijakannya akan terus dilakukan secara bertahap. Asanya, pada tahun 2023/2024, terjadi peningkatan jumlah sekolah penggerak dan sekaligus guru penggeraknya.

Jangan sampai terjadi, bagi sekolah yang memang belum atau tidak siap dalam melaksanakan IKM untuk dipaksakan, sebab akibatnya bisa fatal. Secara prosedural, pihak sekolah mendaftarkan diri ke aplikasi PMM dengan mengunggah data-data pendukung yang ada. Yang memverifikasi data dan dokumen juga langsung dari pusat. Tetapi, dari pusat sendiri dikatakan bahwa sekolah penggerak bukan sekolah yang sudah maju/favorit. Makanya di Sleman penerapan IKM-nya termasuk terakhir, karena dinilai lebih maju dibandingkan dengan daerah lainnya.

Berhubungan dengan kebijakan anggaran, pemberian melalui dana Bantaun Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Pihak pusat telah memberikan BOS Afirmasi bagi sekolah-sekolah yang lolos verifikasi untuk membantu peningkatan IKM. Memang sementara ini tidak ada penganggaran khusus terkait pelaksanaan IKM, tetap melalui dana BOS. Hanya nanti, penjabarannya disesuaikan dengan penganggaran di masing-masing sekolah sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka.

Melalui dana BOS dan BOSDA, sekolah-sekolah dapat membiayai IKM, terutama kegiatan terutama berhubungan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

Memang perlu adanya perubahan skema penganggaran yang dilakukan sekolah. Hal seperti itu menjadi keluhan sekolah karena memang membutuhkan biaya yang cukup banyak jumlahnya, sedangkan bantuan dari pemerintah tidak berubah.

Maka skema pembiayaan yang bisa digagas yaitu: sekolah-sekolah PAUD/TK/SD/SMP menggandeng mitra industri untuk merealisasikan P5. Kerjasama dengan industri sangat memungkinkan dan logis. Pendanaan pendidikan tidak hanya bersumber dari pemerintah, bisa juga berasal dari partisipasi masyarakat. Juga sangat dimungkinkan adanya partisipasi dari perusahaan melalui dana CSR.

Kalau ditarik ke tingkat yang lebih tinggi, di perguruan tinggi dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Perguruan Tinggi diarahkan untuk bersinergi dengan industri. Artinya sekolah-sekolah sejak PAUD sampai SMA/K/MA sangat mungkin dilakukan skema yang sama untuk hal tersebut.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKM ini yang pertama tentunya terkait penguasaan teknologi informasi bagi guru-guru yang sudah senior. Solusinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mengimbau kepada para guru muda, yang penguasaan teknologi informasinya lebih bagus agar mendampingi dan membantu para guru senior dalam memanfaatkan PMM. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman juga sudah meminta kepada para guru senior, jangan patah semangat. Karena yang namanya teknologi, sebenarnya tidak begitu sulit, hanya masalah pembiasaan diri saja.

Kemudian, masih banyak guru yang belajar di PMM hanya sekedar *login* saja. *Road-show* dan sosialisasi dilakukan untuk mengkampanyekan belajar melalui forum/komunitas guru di masing-masing kapanewon. Melalui komunitas akan mempermudah guru untuk belajar. Guru belum paham, perlu dipahami dan



sosialisasi ke depan harus menyentuh semua guru. Guru yang pasif tidak akan mendapatkan informasi yang cukup apabila sosialisasi kurang masif.

Sosialisasi masif yang dilakukan komunitas guru penggerak melalui masing-masing koordinator wilayah. Bisa dilakukan melalui *zoom*. Guru penggerak dijadikan sebagai narasumber. Sosialisasi luring nanti akan dilanjutkan pada tahun 2023, di mana guru-guru yang belum tersentuh menjadi sasaran program tersebut untuk diberikan sosialisasi. Kita sasaran pada guru-guru yang belum tersentuh, guru yang sudah mendapatkan sosialisasi tidak dijadikan sasaran.

Harapan ke depannya, hasil pembelajaran bisa ditunjukkan menjadi lebih baik. Misalnya pada akhir November 2022 telah digelar, *Sleman Expo IKM*, di mana ada 38 SD se-Kabupaten Sleman yang memamerkan hasil proyek P5, dan akan dilanjutkan lagi ke depan dengan peserta yang lebih banyak lagi.

Harapannya masing-masing koordinator wilayah ada kegiatan seperti itu. Walaupun sebenarnya masing-masing sekolah sudah melakukan penampilan proyek P5 dalam *Sleman Expo IKM*, walaupun masih sederhana.

Hal tersebut dilakukan secara masif supaya dapat menggugah guru-guru yang masih kurang paham terkait IKM. Karena memang tuntutan sekarang kreativitas minat anak harus kita ke depankan.

Jadi kaitannya dengan implementasi Kurikulum Merdeka ini tidak bisa lepas dari keaktifan dari para pemangku kepentingan di sekolah. Kepala sekolah, guru, di bawah binaan dari masing-masing sekolah. Tentunya para guru harus aktif selalu belajar di *Platform Merdeka Mengajar*. Karena semua guru sudah diberikan akunnya di PMM. Semua guru, dari pemantauan kami sudah 100 persen *login*.

Para guru penggerak akan disiapkan untuk menjadi pionir-pionir bagaimana pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman akan selalu terus mendorong, bagaimana guru-guru penggerak yang sudah lolos, kemudian juga termasuk

narasumber, pengajar praktiknya, juga aktif memberikan sosialisasi kepada semua guru di Kabupaten Sleman. Karena sekarang ini dengan adanya Kurikulum Merdeka, baik formal maupun non formal tidak ada perbedaan. Semua sama di dalam pelaksanaannya. Sehingga, hal tersebut membutuhkan usaha secara terpadu, bagaimana mewujudkan atau implementasi Kurikulum Merdeka ini secara efektif dan efisien, merata pada semua sektor pendidikan. Intinya kolaborasi secara terpadu, saling mengisi bagaimana bersama-sama bisa mewujudkan hal tersebut.

Terkait dengan peran Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sendiri kaitannya dengan pelaksanaan Kurikulum Merdeka, yaitu melaksanakan peningkatan kompetensi bagi guru-guru untuk mendukung program Merdeka Belajar. Salah satunya melaksanakan program bimbingan teknis di antaranya materinya terkait dengan PMM dan bagaimana guru dapat *login* aplikasi ke PMM baik dari PAUD, SD, hingga SMP.

Terkait dengan strategi khusus mengenai guru senior peduli dan sadar mengenai teknologi TIK, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mengoptimalkan guru-guru muda untuk membantu atau mendampingi para guru senior.

Kata kunci kesuksesan pelaksanaan Kurikulum Merdeka itu adanya guru penggerak, Kabupaten Sleman baru memiliki sekitar 200-an guru penggerak. Sebetulnya Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman selalu mendorong, memberikan motivasi terhadap para guru untuk menjadi guru penggerak, di mana kampanye tersebut dilaksanakan secara berjenjang. Pada angkatan pertama ada 113 guru penggerak; sedangkan pada angkatan kedua ada di 70 guru penggerak; dan pada tingkat SMA/K sudah ada 80 guru penggerak.

Kendala yang dialami para guru dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka, lebih berhubungan dengan kemampuan para guru dalam bidang teknologi informasi. Kendala lain, para guru belum tahu apa yang harus dilakukan berhubungan dengan IKM. Acara bimtek IKM dengan mengundang narasumber dari para guru penggerak

di Sleman, dinilai efektif untuk memahamkan terkait IKM kepada para guru. Kolaborasi, duduk bersama untuk memecahkan masalah, serta saling melengkapi dan saling berbagi terkait implementasi Kurikulum Merdeka menjadi kunci penting bagi kesuksesan program tersebut.

Kronologis historis penerapan Kurikulum Merdeka di Kabupaten Sleman khususnya diawali dengan sosialisasi secara daring dengan gagasan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait implementasi Kurikulum Merdeka. Sebelum kemudian dimunculkan 3 pilihan terkait dengan implementasi Kurikulum Merdeka yaitu Merdeka Belajar, Merdeka Berubah, dan Merdeka Berbagi; yang pertama kali dimunculkan yakni Kurikulum *Prototype*.

Selanjutnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meminta masing-masing satuan pendidikan diminta untuk memilih salah satu dari tiga opsi yang ditawarkan. Setiap Lembaga pendidikan diberi tenggat waktu sampai sekitar Juni 2022 agar memilih 3 opsi yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait dengan persiapan implementasi Kurikulum Merdeka. Selanjutnya semua bidang di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman melakukan persiapan pelaksanaan IKM dengan menggelar FGD yang melibatkan para pengawas sekolah selama 2 hari penuh. Hasilnya, adanya persamaan persepsi terkait IKM. Tahapan berikutnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mengadakan sosialisasi IKM pada salah satu SMP di Kabupaten Sleman dengan mengundang narasumber dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipandang paling relevan menyampaikan informasi mengenai IKM karena menjadi UPT Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di wilayah atau daerah. Harapannya, agar berbagai informasi mengenai IKM yang bergulir sebagai kebijakan pusat bisa didapatkan secara lebih jelas dan komplit dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui LPMP D.I. Yogyakarta. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman juga meminta kepada seluruh sekolah agar aktif mengikuti berbagai webinar yang

dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Perlu diketahui bersama, bahwa pola kebijakan Kurikulum Merdeka berbeda dengan Kurikulum 2013 dan sebelumnya.

Kalau waktu Kurikulum 2013, ada semacam guru inti atau narasumber pusat atau apapun namanya yang kemudian mereka dilatih, disiapkan dan sebagainya. Saat ini memang kementerian tidak mengadakan kegiatan-kegiatan seperti itu, jadi memang guru itu dipaksa untuk belajar melalui berbagai informasi dan terkhusus adalah di *platform* yang disiapkan oleh PMM (*Platform* Merdeka Mengajar).

Untuk memahami terkait dengan implementasi Kurikulum Merdeka, pada setiap ada kegiatan webinar atau apa pun namanya yang diadakan oleh pusat maupun daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman meminta para Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum dan para guru untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dengan mengajak para pengawas sekolah menghadiri Bimtek yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Lantas para pengawas sekolah melakukan pendampingan terhadap sekolah-sekolah yang melaksanakan Kurikulum Merdeka.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman juga terus memantau pemanfaatan *Platform* Merdeka Mengajar dengan berbagai kesempatan, boleh dikatakan hampir setiap saat kesempatan dan kegiatan agar para guru aktif menggunakan *Platform* Merdeka Mengajar. Sebab pada awal pelaksanaan IKM ini, capaian Kabupaten Sleman dalam IKM masih rendah.

Namun berkat pendampingan dari para pengawas sekolah, kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman terus mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan IKM, perkembangannya menjadi lebih baik. Dalam pemakaian PMM, terlihat para guru tidak lagi sekadar *login* saja; tetapi sudah belajar di dalamnya sampai kemudian mereka juga tergabung dalam komunitas dan sebagainya.

Pada awalnya, bahkan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman belum mengetahui akan adanya pemantauan lewat PMM oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam hal tingkat penggunaan PMM. Akhirnya Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman bergerak cepat agar pemanfaatan PMM bisa optimal. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman bersama dengan LPMP DIY melakukan pendampingan bersama terhadap sekolah-sekolah yang capaiannya tidak bagus. Hasilnya cukup menggembirakan, sekolah-sekolah yang masih minim dalam memanfaatkan PMM, menjadi lebih optimal.

Perbedaan utama antara Kurikulum Merdeka dan kurikulum lama:

- Model lama: ditunjuk; model baru, guru penggerak: mendaftarkan diri. Harus lebih dikuatkan perspektifnya.
- Kurikulum model lama guru terbiasa *top-down*; kebijakan baru, dipanggil, dilatih, menularkan ilmu pada yang lain. Kebijakan sekarang, *bottom-up*; Menjadi tantangan; agar guru penggerak benar-benar menjadi motor penggerak, daya ungkit, pemercepat agar guru lain berkeinginan untuk jadi guru penggerak. Menjadi lokomotif di internal sekolah juga di forum-forum di mana mereka berada.
- Kemampuan guru di Kabupaten Sleman tidak perlu diragukan, hanya saja memang masih sedikit yang menjadi guru penggerak. Perlu adanya evaluasi penyebab mengapa yang lolos seleksi sebagai guru penggerak di Sleman masih sedikit. Jumlah guru penggerak yang masih sedikit menjadi tantangan dan menjadi catatan yang tidak mudah untuk dicarikan solusinya dengan baik.

### **Masalah Dalam Pelaksanaan IKM**

Salah satu pemetaan awal yang menjadi tantangan pelaksanaan IKM adalah kemampuan IT para guru yang sudah senior usianya. Solusinya dengan upaya memanggil MGMP TIK agar dapat berlaku aktif secara internal. Guru yang sudah 50 tahun ke atas

dan guru baru diangkat terdapat rentang usia yang cukup jauh dan kemampuan yang berbeda. Maka tugasnya adalah guru-guru senior untuk selalu beradaptasi menggunakan teknologi informasi agar lebih menguasai kegiatan penguatan penguasaan teknologi. Supaya hambatan-hambatan dapat diatasi dari berbagai sisi.

Kurikulum Merdeka menjadi tantangan bagi para guru untuk menumbuhkan cara pikir yang terus berkembang. Namun bagi para guru yang konservatif, hadirnya IKM menjadi masalah karena terbentur pada beragam aturan baru dan metode yang baru.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman melakukan intervensi dengan mendorong para guru memiliki *growth mindset*, artinya siap terhadap adanya perubahan demi perubahan. Karena perubahan menjadi sebuah keniscayaan dari peradaban.

Agar para guru memiliki pergerakan jabatan fungsional yang dinamis, dibutuhkan kemauan dan kemampuan sekaligus. Jangan sampai malahan, adanya IKM justru semakin menghambat pergerakan jabatan fungsional para guru.

Dalam melakukan persiapan IKM, para kepala sekolah sudah melakukannya dengan optimal. Ada yang melalui pojok kerja, ada yang mandiri di sekolahnya.

Kurikulum Merdeka adalah model kurikulum yang tidak dipaksakan untuk diterapkan di lembaga pendidikan. Setiap sekolah diberikan tiga opsi dalam melaksanakan IKM. Opsi pertama, IKM Mandiri Belajar substansinya pihak sekolah masih menggunakan kurikulum lama (Kurikulum 2013) tapi diminta mengadopsi implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajarannya. Opsi kedua, Mandiri Berubah, semua perangkat dan sumber ajar sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tapi pihak sekolah juga diperkenankan untuk melakukan penyesuaian kurikulum dalam praktiknya sesuai kondisi di lapangan. Opsi ketiga, Mandiri Berbagi, pihak sekolah diberi keleluasaan untuk menciptakan sendiri kurikulumnya sehingga memiliki kekhasan dan keunikannya sendiri.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sudah secara intensif melakukan pendampingan kepada berbagai lembaga pendidikan dalam melaksanakan IKM.

Pada jangka pendek, para guru diminta aktif bergabung dan berkegiatan di komunitas guru penggerak. Tuntutannya, guru untuk terus menerus belajar. Untuk jangka panjangnya, targetnya adalah melakukan pendampingan agar sekolah betul-betul siap dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

Bagi para guru: faktor terbesar yang mempengaruhi kesuksesan seorang murid adalah guru, memang persentase pertama adalah profil anak, yang kedua adalah guru. Tentunya dengan terus meningkatkan kompetensi guru, menjadi pribadi diri yang tangguh dan memberikan keteladanan bagi para peserta didik, agar memiliki enam dimensi Pelajar Pancasila.

## **Diskusi**

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Kabupaten Sleman khususnya pada tingkat PAUD, TK, SD, sampai SMP baru dilaksanakan pada Juli 2022 sampai sekarang. Artinya, IKM di Kabupaten Sleman baru berjalan hampir 1 semester saja; dengan demikian belum bisa dilakukan evaluasi secara utuh. Yang bisa dilakukan adalah melakukan monitoring atau pemantauan selama 1 tahun pertama atau 2 semester; baru pada tahun ke-2; IKM dapat dilakukan evaluasi secara proporsional. Tradisi atau kebiasaan para guru yang sudah “sepuh” usia 50 tahun ke atas harus ditumbuhkan dalam memanfaatkan teknologi informasi agar dalam memanfaatkan PMM tidak mengalami kendala. Dibutuhkan kerja keras dan kemauan kuat dari para guru senior agar familiar dengan teknologi informasi. Kepedulian para guru penggerak yang umumnya didominasi para guru muda untuk mendampingi para guru senior dalam memanfaatkan PMM yang sarat dengan aplikasi dan teknologi informasi.

SDM yang profesional, terampil, dan cerdas sangat dibutuhkan untuk menjadi pelaksana Kurikulum Merdeka di Kabupaten Sleman, sehingga dibutuhkan perjuangan yang besar untuk merealisasikan hal tersebut. Proses sosialisasi mengenai berbagai regulasi dan kebijakan mengenai Kurikulum Merdeka di Kabupaten Sleman harus terus digencarkan di kalangan seluruh guru, kepala sekolah, dan pelajar. Masih banyaknya kalangan yang kurang memahami dengan baik mengenai esensi Kurikulum Merdeka, menunjukkan bahwa proses sosialisasinya belum optimal. Banyak sekolah yang sudah dan sedang melaksanakan Kurikulum Merdeka di Kabupaten Sleman belum atau tidak melakukan persiapan dengan baik dan terkesan memaksakan diri.

Untuk itu berbagai perangkat, instrumen, metode, dan dukungan pendanaan untuk menyukseskan Kurikulum Merdeka harus dipersiapkan dengan baik.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman perlu mendorong hadirnya lebih banyak guru penggerak yang mampu menjadi teladan bagi pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Masih sedikitnya para guru yang lolos kriteria sebagai guru penggerak di Sleman, menjadi salah satu tantangan yang harus diatasi; sehingga percepatan akan pemerataan kualitas mutu pendidikan dapat lebih optimal. Riset ini perlu dilanjutkan kembali dengan melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Kurikulum Merdeka



## KURIKULUM MERDEKA DAN PR KE DEPAN

Ada dua kesimpulan besar yang relevan dimunculkan sebagai penutup buku. Pertama, para guru dan kepala sekolah dalam mempersiapkan dan melaksanakan Kurikulum Merdeka di Kabupaten Sleman masih mengalami banyak masalah yang menimpanya. Masalah tersebut terdiri atas: masih banyaknya guru yang belum memanfaatkan secara optimal *Platform Merdeka Mengajar* (PMM) karena faktor usia, masih minimnya para guru penggerak yang dimiliki Sleman; banyaknya guru yang sudah berada pada usia senior (lebih dari 50 tahun) yang tidak memahami dengan baik teknologi informasi. Kendala lainnya, banyak guru belum memahami dengan baik mengenai model penilaian untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan raport siswa sebagai IKM; mereka masih bingung dalam menentukan pembelajaran diferensiasi. Kendala lainnya, khususnya pada siswa SD kelas 1 terkendala pada kemampuan baca tulis yang masih belum merata, serta adanya kesulitan dalam pembuatan proyek yang sesuai dengan tema yang telah ditentukan; serta masalah substantif lainnya sebagaimana sudah dibahas dalam bagian pembahasan.

Kedua, ikhtiar atau solusi atas beragam problematika yang dihadapi para guru dan kepala sekolah dalam mempersiapkan dan melaksanakan Kurikulum Merdeka di Kabupaten Sleman yaitu dengan adanya komitmen yang kuat dari para guru dan kepala sekolah untuk teguh dalam melaksanakan IKM; adanya bimbingan teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dalam pemanfaatan PMM maupun pengaktifan berbagai komunitas guru penggerak; mendorong para guru dan kepala sekolah inovatif dalam merealisasikan P5 dengan menggandeng mitra atau perusahaan/ industri sehingga mendapatkan dukungan pendanaan yang memadai; perlunya lokakarya Kurikulum Merdeka pada masing-masing sekolah sehingga perencanaan dan persiapan kurikulumnya

benar-benar matang; perlunya sosialisasi yang lebih masif dan intensif segala hal yang berhubungan dengan IKM baik kepada para guru, kepala sekolah, orangtua murid, maupun pelajar; serta langkah-langkah solutif lainnya sebagaimana sudah dibahas pada bagian pembahasan.

### **Rekomendasi Tim Penulis untuk IKM**

Adapun rekomendasi yang bisa diberikan melalui buku ini adalah:

Pertama, rekomendasi akademis. Adanya perubahan Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka membutuhkan adaptasi tinggi dan perjuangan dari berbagai pihak. Pihak-pihak yang berkepentingan langsung terhadap dunia pendidikan yaitu: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Dinas Pendidikan; Dewan Pendidikan; Kepala Sekolah; pengawas sekolah, guru, pelajar, dan orangtua/wali. Sedangkan para pihak yang tidak berhubungan langsung dengan dunia pendidikan adalah: masyarakat, industri/ lembaga/swasta, LSM, dan sebagainya. Adaptasi ini dibutuhkan untuk penyesuaian kebijakan, maka dibutuhkan sosialisasi yang memadai, pelaksanaan, monitoring atau pemantauan program pelaksanaan, evaluasi, dan penyempurnaan/peningkatan mutu. Mengingat Kurikulum Merdeka tengah mulai dijalankan di Kabupaten Sleman, keterlibatan dan kepedulian para pihak untuk menyukseskan IKM menjadi kata kunci untuk merealisasikan profil pelajar Pancasila yang ideal.

Pendampingan terhadap para guru senior oleh para guru penggerak dan guru muda dalam memanfaatkan *Platform* Merdeka Mengajar dan teknologi informasi lainnya menjadi strategi penting agar IKM dapat berjalan dengan baik. Riset-riset yang berhubungan dengan pelaksanaan IKM menjadi sangat penting untuk dilakukan dalam rangka untuk melakukan kajian dampak IKM terhadap mutu dan luaran kegiatan belajar mengajar di berbagai sekolah dan memformulasikan berbagai solusi atas masalah yang dihadapi dalam IKM. Anggaran negara termasuk anggaran daerah

untuk melaksanakan IKM perlu untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung IKM yang membutuhkan penguatan pada bidang SDM, infrastruktur, infrakultur, dan dukungan finansial yang memadai.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman juga bisa mengadakan kompetisi dan penghargaan kepada kepala sekolah, guru, pelajar, dan pengawas sekolah, bahkan industri yang mampu menunjukkan karya terbaik dan monumental. Penghargaan kepada para guru dan murid yang berprestasi misalnya yang melaksanakan IKM. Dari hasil FGD menunjukkan bahwa masih ditemukan banyak guru dan kepala sekolah yang belum secara utuh memahami dengan baik substansi mengenai IKM. Sementara infrastruktur Kurikulum Merdeka pada sekolah belum siap benar, namun sudah terburu-buru untuk dilaksanakan Kurikulum Merdeka tersebut. Akibatnya, muncul banyak masalah dalam eksekusi atau pelaksanaan kurikulumnya.

Kedua, rekomendasi praktis. Berbagai sekolah memiliki otonomi luas dalam menjalankan model kurikulum yang akan diterapkan, apakah kurikulum lama, maupun kurikulum baru, bahkan kombinasi keduanya. Adanya IKM, bukan menjadi kewajiban mutlak yang harus dijalankan oleh berbagai lembaga pendidikan. Bahkan IKM memberikan tiga opsi model kurikulum yakni opsi ke-1, ke-2, dan ke-3; di mana pada opsi ke-3 (Merdeka Berbagi); masing-masing sekolah bahkan diperkenankan untuk mendesain, mencetak, dan melaksanakan kurikulum mereka sendiri. Adanya IKM memberikan kesempatan atau peluang bisnis bagi berbagai perusahaan atau instansi untuk berkolaborasi dengan berbagai sekolah dalam program penguatan profil pelajar Pancasila yang menjadi proyek luaran andalan mata pelajaran atau gabungan mata pelajaran. Program seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dimiliki berbagai perusahaan swasta dapat disinergikan dalam kegiatan tersebut.

Ketiga, rekomendasi sosial. Kurikulum Merdeka yang diluncurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Februari 2020 menjadi momentum bagi pembaruan Kurikulum 2013 yang sudah berusia lebih dari 7 tahun. Dengan IKM, diharapkan

kualitas atau mutu lulusan atau SDM yang dihasilkan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA/K; bahkan pada tingkat Perguruan Tinggi sudah tersedia Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Masyarakat harus lebih peduli dan perhatian terhadap kehadiran Kurikulum Merdeka dalam rangka mendukung percepatan IKM untuk seluruh wilayah di NKRI. Kabupaten Sleman sebagai salah satu daerah di DIY yang memiliki catatan baik dalam hal tata kelola pendidikan di DIY, hendaknya mampu mendorong dan mengajak seluruh elemen masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam mendorong pelaksanaan IKM. Keterlibatan masyarakat dalam tata kelola pendidikan baik kapasitasnya sebagai orang tua/wali murid, komite sekolah, tokoh masyarakat, anggota Dewan Pendidikan, anggota DPR/D/DPD RI, dan lain sebagainya menjadi bagian tidak terpisahkan dalam menyukseskan IKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Deni Sopiansyah dkk. (2021). Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). Religion Education Social Laa Roiba Journal RESLAJ Vol 4 No. 1 (2022). IAIN Laa Roiba Bogor. Bisa diakses: <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/reslaj/article/view/458>
- Rita Nunung Tri Kusyanti. 2023. Analisis Standarisasi Laboratorium Fisika dalam Mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 1 Tempel. Jurnal Karya Ilmiah Guru IDE GURU Vol. 8 No. 1 (2023). Bisa diakses: <https://jurnal-dikpora.jogjaprov.go.id/index.php/jurnalideguru/article/view/404>
- Shofia Hattarina, Nurul Saila, Adenita Faradilla, Dita Refani Putri, RR. Ghina Ayu Putri. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di Lembaga Pendidikan. Prosiding Seminar Nasional Sosial, Sains, Pendidikan, Humaniora SENASSDRA Vol. 1 (2022). FKIP Universitas PGRI Madiun. Bisa diakses: <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SENASSDRA/article/view/2332>
- Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 044/H/KR/2022 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka pada Tahun Ajaran 2022/2023 per 12 Juli 2022 per 12 Juli 2022
- Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman melalui Google Meet pada 28 November 2022.
- Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman melalui Google Meet pada 29 November 2022.
- Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman melalui Google Meet pada 28 November 2022.
- Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan PTK Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman melalui Google Meet pada 28 November 2022

## LAMPIRAN



FGD: Para guru dan kepala sekolah mengikuti FGD IKM di Twins Asri Sleman pada 7 November 2022 (1)



FGD: Para guru dan kepala sekolah mengikuti FGD IKM di Twins Asri Sleman pada 7 November 2022 (2)



FGD: Para guru dan kepala sekolah mengikuti FGD IKM di Twins Asri Sleman pada 7 November 2022 (3)



FGD: Para guru dan kepala sekolah mengikuti FGD IKM di Twins Asri Sleman pada 7 November 2022 (4)





FGD: Para guru dan kepala sekolah mengikuti FGD IKM di Twins Asri Sleman pada 7 November 2022 (5)



FGD: Para guru dan kepala sekolah mengikuti FGD IKM di Twins Asri Sleman pada 7 November 2022 (6)





SEMINAR: Seminar Peran Komite Sekolah dalam IKM di Rich Sahid Hotel Yogyakarta pada 15 November 2022 (1)



SEMINAR: Seminar Peran Komite Sekolah dalam IKM di Rich Sahid Hotel Yogyakarta pada 15 November 2022 (2)



SEMINAR: Seminar Peran Komite Sekolah dalam IKM di Rich Sahid Hotel Yogyakarta pada 15 November 2022 (3)



SEMINAR: Seminar Peran Komite Sekolah dalam IKM di Rich Sahid Hotel Yogyakarta pada 15 November 2022 (4)



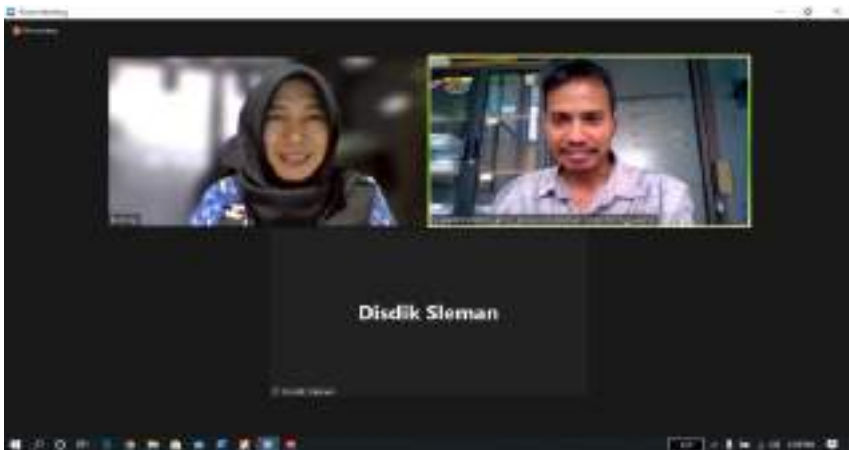
SEMINAR: Seminar Peran Komite Sekolah dalam IKM di Rich Sahid Hotel Yogyakarta pada 15 November 2022 (5)



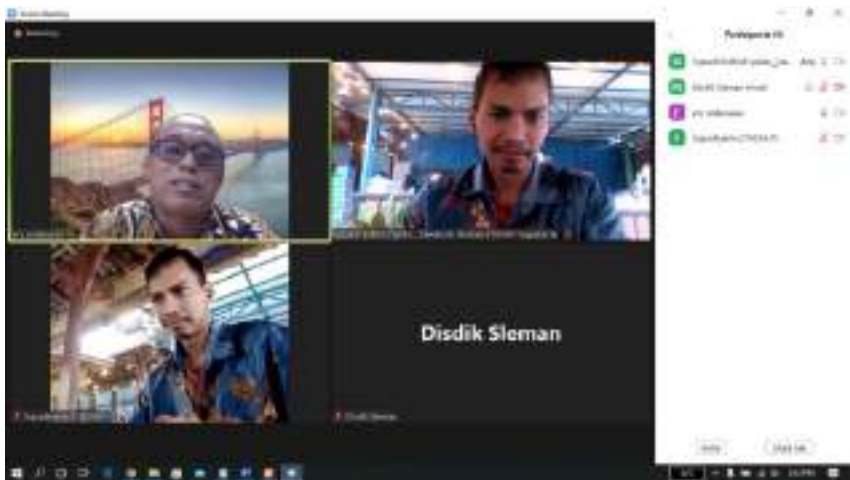
SEMINAR: Seminar Peran Komite Sekolah dalam IKM di Rich Sahid Hotel Yogyakarta pada 15 November 2022 (6)



SEMINAR: Seminar Peran Komite Sekolah dalam IKM di Rich Sahid Hotel Yogyakarta pada 15 November 2022 (7)



Wawancara: Wawancara daring dengan Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman via Google Meet pada 29 November 2022 (1)

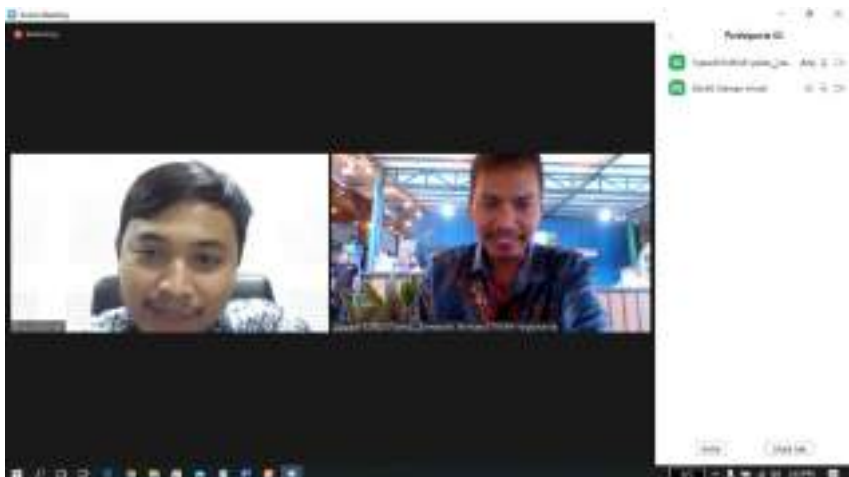


Wawancara: Wawancara daring dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman via Google Meet pada 28 November 2022 (2)



Wawancara: Wawancara daring dengan Kabid Pembinaan PTK Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman via Google Meet pada 28 November 2022 (3)





Persiapan wawancara daring dengan para pemegang kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman via Google Meet pada 28 dan 29 November 2022 (4)



Wawancara: Wawancara daring dengan Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman via Google Meet pada 28 November 2022 (5)

**DAFTAR PERTANYAAN PEMANDU/FASILITATOR FGD  
RISET DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN PER 7  
NOVEMBER 2022**

**Topik: Pemetaan Masalah dalam Persiapan dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Tingkat PAUD/TK, SD, serta SMP di Kabupaten Sleman Tahun 2022**

**PERTANYAAN UNTUK KEPALA SEKOLAH TK/SD dan SMP YANG SUDAH MELAKSANAKAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR**

1. Sejak kapan Anda (kepala sekolah) menerapkan kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah Anda?
2. Bagaimana persiapan yang sudah dilakukan untuk menerapkan Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah Anda?
3. Bagaimana dampak positif atas pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah Anda?
4. Mengapa Anda memilih menerapkan Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah Anda?
5. Bagaimana hasil monitoring pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah Anda?
6. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh kepala sekolah dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah Anda?
7. Bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan atau kendala dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah Anda?
8. Bagaimana tanggapan atau respon dari para guru di sekolah Anda terkait pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah Anda?
9. Bagaimana tanggapan atau respon dari para siswa di sekolah Anda terkait pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah Anda?
10. Bagaimana tanggapan atau respon dari para orangtua murid di sekolah Anda terkait pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah Anda?

11. Apa sudah ada hasil evaluasi yang dilakukan oleh pihak sekolah berhubungan dengan pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah Anda dalam 1 semester terakhir?
12. Apa para kepala sekolah sudah mendapatkan informasi dan sosialisasi yang penuh terkait Kurikulum Merdeka Belajar dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan atau pihak berwenang lainnya?
13. Apa di sekolah sudah memiliki fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka Belajar?
14. Apa masalah-masalah lainnya yang menghambat pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah Anda?



## **PERTANYAAN UNTUK GURU TK/SD DAN SMP YANG SUDAH MELAKSANAKAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR**

1. Sejak kapan Anda (guru) menerapkan kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar dalam KBM di sekolah Anda?
2. Terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar, apa Anda sudah memahami dengan baik bagaimanakah seharusnya Kurikulum Merdeka Belajar dijalankan?
3. Apa Anda sudah memahami dengan baik terkait berbagai regulasi yang mengatur mengenai Kurikulum Merdeka Belajar dijalankan?
4. Bagaimana implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dalam KBM dalam mata pelajaran yang Anda ampu di sekolah?
5. Bagaimana dampak pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar terhadap mutu KBM di sekolah Anda?
6. Sebutkan dan jelaskanlah berbagai kendala yang dihadapi para guru dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka Belajar terhadap mutu KBM di sekolah Anda!
7. Dari sisi substansi kurikulum, faktor apa saja yang membedakan antara Kurikulum Merdeka Belajar dengan kurikulum sebelumnya (Kurikulum 2013/K-13)?
8. Model kesulitan apa saja yang dihadapi para guru dalam mengajarkan berbagai mata pelajaran yang berbasis pada Kurikulum Merdeka Belajar?
9. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan Anda, kesulitan-kesulitan apa saja yang dihadapi para murid dalam memahami berbagai mata pelajaran yang berbasis pada Kurikulum Merdeka Belajar?
10. Apa para guru sudah mendapatkan informasi dan sosialisasi yang penuh terkait Kurikulum Merdeka Belajar dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan atau pihak berwenang lainnya?

11. Apa para guru di sekolah sudah mendapatkan fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan KBM dengan Kurikulum Merdeka Belajar?
12. Bagaimana kendala yang dihadapi para guru dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah Anda?
13. Bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan atau kendala dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah Anda?
14. Bagaimana tanggapan atau respon dari para guru di sekolah Anda terkait pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah Anda?
15. Bagaimana tanggapan atau respon dari para siswa di sekolah Anda terkait pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah Anda?
16. Bagaimana tanggapan atau respon dari para orangtua murid di sekolah Anda terkait pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah Anda?
17. Apa masalah-masalah lainnya yang menghambat pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah Anda?

**PERTANYAAN UNTUK PEMEGANG KEBIJAKAN (KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. SLEMAN, KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD/TK, SD, DAN SMP)**

1. Bagaimana strategi kebijakan yang ditempuh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dalam mengawal pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar?
2. Sejak kapan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman merekomendasikan adanya pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar pada sekolah-sekolah di Kabupaten Sleman?
3. Apa Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman menargetkan seluruh sekolah untuk menerapkan kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar pada sekolah-sekolah di Kabupaten Sleman?
4. Berapa jumlah sekolah TK, SD, dan SMP di Kabupaten Sleman yang sudah menerapkan kurikulum merdeka Belajar sekarang?
5. Apa dalam proses sosialisasi kurikulum Merdeka Belajar, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sudah melibatkan berbagai sarana komunikasi, termasuk melibatkan seluruh *stakeholder* pendidikan?
6. Apa Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sudah mengalokasikan dana khusus untuk pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di Kabupaten Sleman? Berapa besarnya anggarannya?
7. Apa dalam monitoring pelaksanaan Kurikulum Merdeka di Kabupaten Sleman, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mengalami kendala-kendala yang dihadapi di lapangan?
8. Kendala apa saja yang dialami?
9. Bagaimana juga solusi yang dilakukan Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman dalam mengatasi berbagai kendala di atas?
10. Berapa jumlah tim yang diturunkan Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman dalam memformulasikan pelaksanaan kebijakan Kurikulum Merdeka di Kabupaten Sleman?
11. Apa masalah-masalah lainnya yang menghambat pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah Anda?

**PERTANYAAN UNTUK MURID PADA SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR (TERPISAH DAN MENYUSUL)**

1. Apa sudah tahu mengenai Kurikulum Merdeka Belajar?
2. Apa para murid sudah mudah memahami mengenai materi mata pelajaran yang disampaikan para guru yang menyampaikan berbagai metode pembelajaran dengan model Kurikulum Merdeka Belajar?
3. Apa tahu perbedaan antara mata pelajaran yang diajar dengan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka Belajar?
4. Apa pihak sekolah sudah menyosialisasikan dengan baik mengenai Kurikulum Merdeka Belajar pada seluruh murid?
5. Apa sumber-sumber referensi berupa buku maupun teknologi digital yang mendukung Kurikulum Merdeka Belajar sudah tersedia dengan baik dan mudah diakses oleh seluruh siswa?
6. Apa para murid merasa senang dengan mata pelajaran berbasis Kurikulum Merdeka Belajar?
7. Apa para murid merasa kesulitan dengan mata pelajaran berbasis Kurikulum Merdeka Belajar?
8. Kendala dan hambatan apa saja yang dialami para murid dalam memahami berbagai mata pelajaran dengan menggunakan Kurikulum baru Merdeka Belajar?

## **PERTANYAAN UNTUK KEPALA SEKOLAH/GURU TK, SD, SMP YANG TIDAK MELAKSANAKAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR (TERPISAH DAN MENYUSUL)**

1. Mengapa pihak sekolah sampai sekarang belum atau tidak melaksanakan Kurikulum Merdeka Belajar?
2. Apa ada rencana ke depan pihak sekolah menerapkan kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar?
3. Hambatan apa saja yang dialami dalam pelaksanaan Kurikulum 13 di sekolah selama ini?
4. Apa ada kritik perbaikan untuk pelaksanaan Kurikulum 2013 yang usianya sudah hampir 10 tahun?
5. Bagaimana keunggulan Kurikulum 2013 jika disandingkan dengan Kurikulum Merdeka Belajar?
6. Apa pihak sekolah (kepala sekolah dan guru) sudah mendapatkan sosialisasi mengenai keberadaan Kurikulum Merdeka Belajar sampai sekarang?
7. Apa pihak sekolah (kepala sekolah dan guru) sudah memahami dengan baik mengenai keberadaan Kurikulum Merdeka Belajar sampai sekarang?

**CATATAN PENTING:** Di atas adalah daftar poin pertanyaan singkat yang digunakan para pemandu FGD. Karena penelitian ini adalah kualitatif dan menangkap pengalaman empirik para pelaku dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar; maka para pemandu FGD atau fasilitator sangat terbuka bisa saja mengembangkan model pertanyaan lainnya (secara spontanitas maupun terencana) menyesuaikan dengan temuan-temuan fakta di lapangan saat dilakukan FGD. Karena salah satu karakter penelitian kualitatif adalah luwes, fleksibel, dan adaptatif. Para asisten tim peneliti akan melakukan perekaman dan pendokumentasian baik secara audio, video, maupun visual saat pelaksanaan FGD untuk mengamankan segala data-data dan fakta-fakta yang diungkapkan oleh para narasumber atau informan dalam FGD, untuk kemudian dilakukan verbatim (alih dokumen acara FGD menjadi teks, grafik, dan visual) sebagai bagian dari analisis untuk memudahkan penarikan kesimpulan akhir.

## PROFIL TIM PENELITIAN PENULIS



**Dr. John Suprihanto, M.I.M.**, adalah Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025. Lahir di Metro, 27 Desember 1952. Adalah Lektor Kepala IV/D pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Lulus Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada 1974-1979, mengambil Master di *American Graduate School of International Management*, Arizona, USA lulus tahun 1989 dan menempuh pendidikan Doktor di *Flinders University Adelaide South Australia* lulus tahun 2006. Saat ini masih menjadi pengajar pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Saat ini tercatat sebagai sekretaris Senat Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Buku yang pernah diterbitkan: Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan, Hubungan Industrial, Bisnis Pengantar (bersama), Manajemen Modal Kerja, Manajemen Belanja Daerah, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Perusahaan (bersama), dan Perilaku Organisasi (bersama). Sampai saat ini masih aktif pula memberi kuliah pada mata kuliah: Manajemen, Bisnis Pengantar, Bisnis Internasional, MSDM, Manajemen Strategik Sektor Publik, Manajemen Pemasaran Rumah Sakit, Manajemen Pemasaran Sosial, Manajemen Pemasaran Pariwisata, Manajemen Keuangan Sektor Publik, Manajemen Kinerja, Kewirausahaan, dan Etika Bisnis di Universitas Gadjah Mada. Kontak WA/HP: 0819-3117-1008 e-mail: [john.soeprihanto@gmail.com](mailto:john.soeprihanto@gmail.com).



**Profesor Dr. Avin Fadilla Helmi**, adalah Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025. Saat ini juga dosen pada Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Lahir di Ngawi, 22 Desember 1964. Guru

Besar pada bidang keilmuan: *Ciberpsychology*. Tinggal di: Jalan Kenanga, Gang Kantil 4A, Babadan Baru (Jalan Kaliurang Km 7). Sleman Yogyakarta Kodepos: 55283. Kontak WA/HP: 0811-2666-54 e-mail: *avinpsi@ugm.ac.id*.



**Supadiyanto, S.Sos.I., M.I.Kom.** adalah Sekretaris Umum Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025. Saat ini menjadi Pembantu Ketua I STIKOM Yogyakarta dan merangkap menjadi Ketua Pogram Studi Sarjana Ilmu Komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu "STIKOM"

Komunikasi Yogyakarta. (Lektor 349,25 AK terhitung mulai Desember 2020). Dosen tetap dan dosen tamu/luar biasa pada Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Studi Penyiaran Akademi Komunikasi Indonesia (AKINDO) YPK, Program Studi Penyiaran Akademi Komunikasi Radya Binatama/AKRB (AMIKOM Group). Turut membidani perubahan bentuk Akademi Komunikasi Indonesia YPK menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Yogyakarta, dan pendirian Prodi S1 Ilmu Komunikasi STIKOM Yogyakarta. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Tim Perubahan Bentuk AKINDO YPK menjadi STIKOM Yogyakarta. Pernah menjabat sebagai Ketua Penjaminan Mutu AKINDO YPK (2016-2018). Adalah alumni Program Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro Semarang. Menjadi lulusan terbaik dan tercepat dengan IPK: 4,00 masa studi 1 tahun 5 bulan pada Wisuda ke-134 Universitas Diponegoro pada 29 April 2014. Penulis artikel (kolumnis) di berbagai surat kabar lokal dan nasional. Pernah menjadi Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY Periode 2014-2017. Saat ini menjabat sebagai Sekretris I Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Pusat (2017-2022), turut pula mendeklarasikan berdirinya PPWI 11 November 2007 di Jakarta. Telah menulis 13 buku yang sudah diterbitkan antara lain: "Media, Komunikasi, dan Krisis COVID-19 (2020, kolektif bersama penulis lain), Pengantar Jurnalisme Konvergentif" (2020), "Masa Depan Indonesia, Bangkit atau Bangkrut! Prisma Pemikiran

Progresif di Berbagai Surat Kabar" (2018), "Rahasia Opini Termuat di Koran, Refleksi Pengalaman Pribadi Menulis di Berbagai Surat Kabar Lokal dan Nasional" (2018), "Eksplorasi Pekerja Media di Era Konvergensi Media dalam Menegakkan Kedaulatan Komunikasi" (2014), "Berburu Honor Dengan Artikel, Tip dan Strategi Menanggung Rupiah" (2012), "Jadi Penulis Anda Modal Dengkul" (2008), "Booming Profesi Pewarta Warga, Wartawan&Penulis" (2009), dll. e-mail: *supadiyantostikomyogyakarta@gmail.com* WA/HP: 0819-1076-7633.



**Profesor Dr. Theresia Anita Christiani**, adalah Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025. Lahir pada di Sleman, 21 Desember 1969. Pernah menjadi Wakil Rektor II Bidang Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Kini menjadi dosen pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan pangkat Lektor Kepala. Kontak WA/HP: 0811-2503-192 e-mail: *theresiaanita27@gmail.com*.



**Drs. Suyono, M.Pd.**, adalah Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025. Menamatkan S1 dan S2 pada Program Magister Pendidikan FKIP Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa Yogyakarta. Jabatan terakhir sebagai Pengajar Diklat Fungsional Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta dan juga Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta. Aktif sebagai pengurus Ormas Muhammadiyah yakni menjadi Wakil ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman. Alamat tinggal di: Ponggok RT 03 RW 13, Sumberagung, Moyudan, Sleman, Yogyakarta. Telp: (0274) 6497060. HP/WA: 081328015115. e-mail: *Syon115@yahoo.com*.





**Sudiyo, S.Ag., M.Pd.**, adalah Ketua Umum Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025. Bergabung menjadi Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman sejak Periode 2009-2014; Periode 2015-2020, sampai sekarang. Saat ini juga menjadi Ketua Umum PGRI Kabupaten Sleman.

Lulus S2 dari Universitas PGRI Yogyakarta dan S1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di samping itu juga menjadi Anggota Dewan Koperasi Daerah Kabupaten Sleman Periode 2016-2020. Domisili di Kurahan III RT 002/RW 005 Kelurahan Margodasi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY. Kontak HP/WA: 0812-2637-197 e-mail: *sudiyosudiyo1@gmail.com*.



**Dr. St. Nurbaya, M.Si, M.Hum.**, adalah Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025. Saat ini juga menjadi Dosen Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Lektor Kepala dengan pangkat

Pembina/IVa dengan bidang keilmuan: Pembelajaran Bahasa konsentrasi Evaluasi Literasi Berbahasa. Lahir di Bima, 6 April 1964. Alamat tinggal di: Grogol Margodadi RT 06 / RW 18 Seyegan, Sleman, Yogyakarta. Kontak WA/HP: 0821-3755-2823 e-mail: *siti\_nurbaya@uny.ac.id*.



**Drs. H. Nurjamil Dimiyati**, adalah Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025. Aktif pada Organisasi Sosial Kemasyarakatan PCNU Kabupaten Sleman. Alamat rumah: Kleben, Caturharjo, Sleman, Sleman, Yogyakarta, 55515. WA/HP: 08122774022 e-mail: *nurjamildimiyati@*

*gmail.com*.



**Drs. H. Buchori**, adalah Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025. Alamat rumah: Keniten, Tamanmartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Lahir di Sleman pada 30 Desember 1952. Pernah menjadi Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sleman 2010–2015, dan kini juga menjabat sebagai: Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Kalasan 2015-2020. Kontak HP/WA: 0812-2707-7177.



**Akhmad Ritaudin, M.Pd.** adalah Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025. Lahir di Bantul, 8 April 1985. Lulus S-I PGSD Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2010, dan lulus S-2 Manajemen Pendidikan UST tahun 2019. Saat ini menjadi guru SD Negeri Percobaan 3 Pakem, Sleman, Yogyakarta. Akhmad sendiri pernah menjuarai lomba *stand up comedy* berbahasa Jawa. Berpengalaman sebagai sutradara lomba vlog anak Kuis Ki Hajar Dewantara, berhasil meraih vlog terbaik SD tingkat nasional. Saat ini aktif sebagai instruktur nasional, pengajar diklat guru untuk mengembangkan potensi guru. Aktif juga sebagai *Youtuber*, *vlogger*, dan komedian. Kontak HP/WA: 0815-7907-972.



**Nursya'bani Purnama, S.E, M.Si**, adalah Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman Periode 2020-2025. Mendapatkan gelar S.E. dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada dan gelar Master of Science in Management dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Kini tengah merampungkan studi S3. Di samping itu juga pernah menjadi Komisioner Lembaga Ombudsman DIY Periode 2011-2015, Pimpinan BAZNAS DIY Periode 2015-2020, Dewan Pengawas PDAM Kulon Progo 2011-2017, dan Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha Kulon Progo 2020-2024. Kerap menulis artikel di sejumlah surat kabar antara lain: SKH Kedaulatan Rakyat dll. HP/WA: 0815-6856-874. e-mail: [nursya'bani.purnama@uii.ac.id](mailto:nursya'bani.purnama@uii.ac.id).